



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 2019



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.MPd.
Bupati Majalengka



TARSONO D. MARDIANA
Wakil Bupati Majalengka





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim No. 520 Majalengka Kode Pos 45413

Telepon (0233) 281157 Faximile (0233) 281157

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Majalengka. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, sebagian besar tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, kecuali hal-hal tertentu yang secara lengkap tertuang dalam Laporan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT



Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660826 199303 1 009



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019, sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja.

Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas kinerja dan publikasi informasi tentang realisasi anggaran serta capaian target indikator kinerja, maka pada akhir pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tahun 2019, disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Majalengka tahun 2019. Penyusunan dokumen ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejumlah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan. Capaian kinerja ini telah dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan (*bottlenecking*) yang terjadi, serta merencanakan strategi pemecahan permasalahan



Harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 ini menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban serta dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.



Majalengka

Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.MPd



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sudah menjadi kewajiban seluruh jajaran pemerintah untuk mewujudkan penerapan SAKIP. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Kabupaten Majalengka menetapkan Visi “**Majalengka Raharja**”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkanlah menjadi 5 (lima) misi, beserta tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama, Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

Terdapat 1 Tujuan dalam Misi Pertama, yaitu:

1. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam prilaku kehidupan masyarakat, dengan **sasaran**:
 - a. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.



Misi Kedua, Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat

Terdapat 2 Tujuan dalam Misi Kedua, yaitu:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor, dengan **sasaran** yaitu :
 - a. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
 - b. Pengurangan Tingkat Kemiskinan.
2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, dengan **sasaran** Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Misi Ketiga, Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat 1 Tujuan dalam Misi Ketiga, yaitu:

1. Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik, dengan **sasaran** yaitu :
 - a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja
 - b. Terwujudnya akuntabilitas keuangan
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - d. Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.

Misi Keempat, Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Terdapat 1 (satu) Tujuan dalam Misi Keempat, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan **sasaran** yaitu :

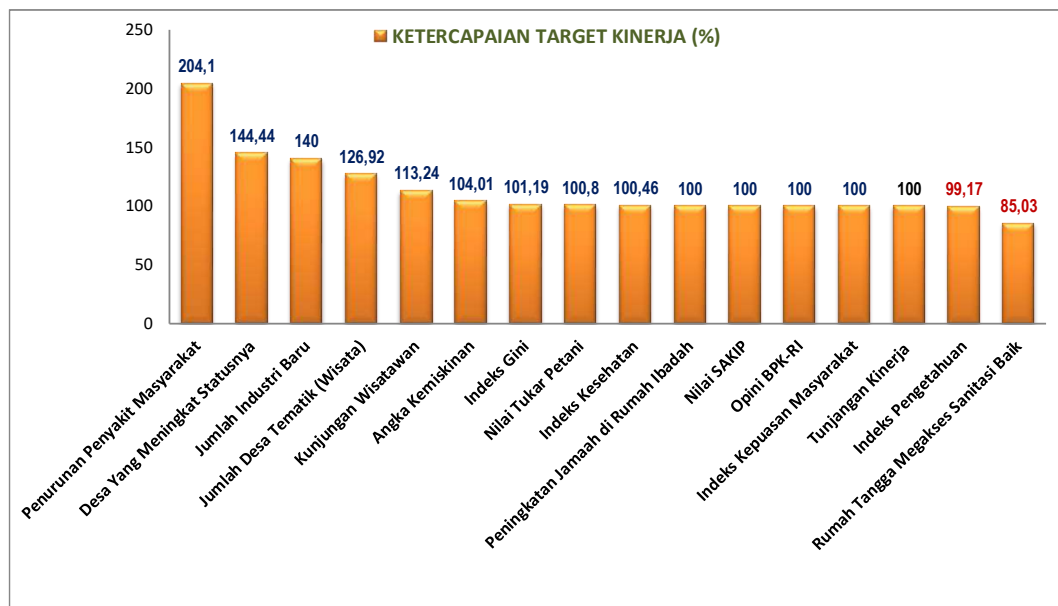


- Meningkatnya Mutu pendidikan
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- Meningkatnya kesejahteraan petani
- Meningkatnya kunjungan wisata
- Meningkatnya Investasi Sektor Industri
- Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa.

Misi Kelima, Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan Misi Kelima yaitu Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan **sasaran** meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan tersebut di atas, ditindaklanjuti melalui penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 yang terdiri dari 16 sasaran dan 17 indikator sasaran, pengukurannya menunjukkan bahwa **14 indikator (82,35%) mencapai atau melebihi target** karena realisasinya sama dengan atau lebih dari 100 persen. 1 Indikator (Indeks Profesionalitas ASN) tidak bisa dinilai karena perubahan pada metode perhitungannya dan 2 indikator belum mencapai target karena realisasinya kurang dari 100 persen. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator pada tahun 2019 mencapai 113,71 persen. **Capaian ini jauh lebih baik dari capaian pada tahun sebelumnya** karena pada tahun 2018 dari 21 sasaran dan 35 indikator sasaran yang mencapai target hanya 17 indikator (48,6%).

Realisasi keuangan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pada tahun 2019 sebesar Rp 1.195.833.372.318,00 (realisasi keuangan 88,73 persen, realisasi fisik 100,00 persen) adapun realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp1.240.870.106.885,45 (realisasi keuangan 91,86 persen, realisasi fisik 99,80 persen). **Tahun 2019 capaian efisiensi dari perbandingan realisasi keuangan dan realisasi fisik, yaitu 1,14 persen** lebih tinggi dari tahun 2018 dengan nilai efisiensi 1,09. Adapun **Analisis Efisiensi Sumberdaya dari sisi perbandingan realisasi keuangan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 mencapai 24,86 persen.**

Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata kinerja sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Uraian | Rata-Rata Capaian (%) |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | 100 |
| 2. | Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 136,43 |
| 3. | Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | 100 |
| 4. | Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | 109,38 |
| 5. | Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | 144,44 |
| Rata-Rata (%) | | 118,05 |

Sedangkan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir periode RPJMD tahun 2023 diperoleh bahwa rata-rata kinerja sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :

| Misi | Uraian | Rata-Rata Capaian (%) |
|------|--|-----------------------|
| 1. | Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Uraian | Rata-Rata Capaian (%) |
|------|---|-----------------------------|
| | tokoh-tokoh agama | |
| 2. | Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 73,76 |
| 3. | Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | 65,21 |
| 4. | Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | 102,64 |
| 5. | Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | 23,53 |
| | Rata-Rata (%) | 73,03 |

Demikian ringkasan eksekutif LAKIP Kabupaten Majalengka tahun 2019 ini, dengan tekad yang tinggi diharapkan laporan ini akan menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk lebih baik dalam mencapai berbagai target kinerja sesuai perencanaan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Gambaran Umum Organisasi | I-1 |
| 1.2a Susunan Perangkat Daerah..... | 1-3 |
| 1.2b Keuangan Daerah..... | 1-8 |
| 1.2c Sumber Daya Aparatur..... | 1-8 |
| 1.2d Aspek Startegis Organisaai..... | 1-11 |
| 1.3 Isu-isu Strategis Pembangunan | I-14 |
| 1.3a Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing serta Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan Bermutu..... | 1-14 |
| 1.3b Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat..... | 1-15 |
| 1.3c Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..... | 1-16 |
| 1.3d Operasionalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)..... | 1-18 |
| 1.3e Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk..... | 1-18 |
| 1.3f Ketahanan Pangan..... | 1-19 |
| 1.3g Kemandirian Desa..... | 1-20 |
| 1.3h Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..... | 1-20 |
| 1.4 Dasar Hukum..... | 1-21 |
| 1.5 Sistematika Penyusunan..... | 1-26 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | II-1 |
| 2.1 Rencana Strategis..... | II-1 |
| 2.1.1 ViSi..... | II-1 |
| 2.1.2 Misi..... | II-3 |
| 2.1.3 Tujuan dan Sasaran..... | II-4 |



| | | |
|---------|--|--------|
| | 2.2 Perjanjian Kinerja..... | II-10 |
| BAB III | : AKUNTABILITAS KINERJA | III-1 |
| | 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | III-2 |
| | 3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja..... | III-2 |
| | 3.1.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Dan 2019..... | III-13 |
| | 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode RPJMD/Tahun 2023)..... | III-19 |
| | 3.1.4 Benchmark Kinerja..... | III-26 |
| | 3.1.5 Kinerja Lainnya..... | III-28 |
| | 3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja..... | III-29 |
| | 3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | III-40 |
| | 3.1.7a Pendekatan Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Capaian Indikator Kinerja..... | III-41 |
| | 3.1.7.b Pendekatan Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Capaian Realisasi Fisik..... | III-43 |
| | 3.1.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja..... | III-46 |
| | 3.1.9 Permasalahan Umum Yang Dihadapi Dan Solusinya..... | III-59 |
| | 3.2 Realisasi Anggaran..... | III-62 |
| | 1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019..... | III-62 |
| | 1.1. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah..... | III-62 |
| | 1.2. Target Dan Realisasi Belanja Daerah..... | III-65 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| | | |
|--------|--|--------|
| 1.3. | Target Dan Realisasi Pembiayaan..... | III-67 |
| 2. | Permasalahan dan Solusi..... | III-72 |
| 2. | Realisasi Program Untuk Mencapai Target Kinerja Tahun 2019..... | III-72 |
| BAB IV | : PENUTUP | IV-1 |

| | | |
|----------|----|--|
| Lampiran | 1. | Data Prestasi Tahun 2019 |
| | 2. | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023 |
| | 3. | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 |
| | 4. | SK Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 |
| | 5. | SOP Pengumpulan Data |
| | 6. | SK Tim Pengelola Data |
| | 7. | Surat Pernyataan Validasi Data IKU |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel. 1.1 : Gambaran Singkat Keuangan Daerah..... | I-8 |
| Tabel. 1.2. : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin..... | I-10 |
| Tabel. 1.3. : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019..... | I-10 |
| Tabel. 1.4. : Pelaksanaan Janji 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Tahun 2019..... | I-12 |
| Tabel. 2.1. : Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023..... | II-6 |
| Tabel. 2.2. : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... | II-9 |
| Tabel. 2.3. : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2019..... | II-13 |
| Tabel. 3.1. : Pengukuran Kinerja Tahun 2019..... | III-3 |
| Tabel. 3.2. : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2019..... | III-13 |
| Tabel. 3.3. : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Akhir Tahun RPJMD 2019-2023..... | III-20 |
| Tabel. 3.4. : Perbandingan Indikator Kinerja Dengan Wilayah Lain..... | III-26 |
| Tabel. 3.5. : Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja..... | III-29 |
| Tabel. 3.6. : Efisiensi Sumber Daya..... | III-41 |
| Tabel. 3.7.1 : Perbandingan Realisasi Keuangan Dan Fisik..... | III-44 |
| Tabel 3.7.2 : Perbandingan Tahun 2018 dan 2019..... | III-45 |
| Tabel. 3.8. : Permasalahan Umum Yang Dihadapi Dan Solusinya..... | III-59 |
| Tabel. 3.9. : Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019..... | III-64 |
| Tabel.3.10. : Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019..... | III-66 |
| Tabel.3.11. : Target Dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019..... | III-71 |
| Tabel.3.12. : Tabel Realisasi Keuangan Dan Fisik..... | III-73 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 : Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang ke 6 kalinya secara berturut-turut..... | I-8 |
| Gambar 1.2 : Bupati Majalengka menerima piala API Award 2019 kategori Wisata AIR Terpopuler melalui destinasi wisata cikadongdong river tubing desa payung Kecamatan Rajagaluh..... | I-17 |
| Gambar 1.3 : Bupati Majalengka Menerima Penghargaan Kabupaten Kreatif dari Bekraf RI..... | I-17 |
| Gambar 1.4 : Bupati Majalengka menerima penghargaan pelayanan publik dari Menteri PAN-RB..... | I-21 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang diciptakan untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan *good governance*. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini ditujukan sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan.

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta mewujudkan akuntabilitas kinerja, Kabupaten Majalengka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah



Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Majalengka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Karna Sobahi dan Tarsono Mardiana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 19 Desember 2018.

a. Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14). Sesuai dengan pasal Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah ;
2. Sekretariat DPRD ;
3. Inspektorat ;
4. Dinas ;
5. Badan ; dan
6. Kecamatan.

Ada pun susunan dan tipologi perangkat daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :



dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851). Pusat Pemerintahan Kabupaten Majalengka terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani No. 1 Majalengka.

Secara administratif wilayah Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km², terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 6^o 32' 16,39" Lintang Selatan sampai dengan 7^o 4' 24,75" Lintang Selatan dan 108^o 2' 30,87" Bujur Timur sampai dengan 108^o 24' 32,84" Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 Kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.



1. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A ;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. Inspektorat Kabupaten Majalengka merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
4. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; .
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
 6. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 7. Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;



8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
9. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub urusan Sumber Daya Air;
13. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan urusan pemerintah bidang kebudayaan ;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;



17. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan);
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 19. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan ;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
5. Badan terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;



3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.
6. Kecamatan terdiri dari :
 1. Kecamatan Argapura dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Banjaran dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Bantarujeg dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Cigasong dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Cikijing dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Cingambul dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Dawuan dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Jatiwangi dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Kadipaten dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Kasokandel dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Leuwimunding dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Maja dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Malausma dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Palasah dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Panyingkiran dengan Tipe A;
 21. Kecamatan Rajagaluh dengan Tipe A;
 22. Kecamatan Sindang dengan Tipe A;
 23. Kecamatan Sindangwangi dengan Tipe A;
 24. Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
 25. Kecamatan Sumberjaya dengan Tipe A;
 26. Kecamatan Talaga dengan Tipe A.



b. Keuangan Daerah

Pada tahun 2019 total Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebesar Rp.3.212.916.766.996,22 naik dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp.2.991.979.376.190,55.

Pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 nilai Belanja Langsung sebesar

Rp.1.434.824.111.230,33 sedangkan Belanja Tidak Langsunnya sebesar Rp.1.778.092.655.765,89.



Gambar 1.1. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -6 kalinya secara berturut-turut

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018 tercatat sebesar RP.447.461.013.153,00 naik pada tahun 2019 menjadi sebesar RP.480.737.673.476,07.

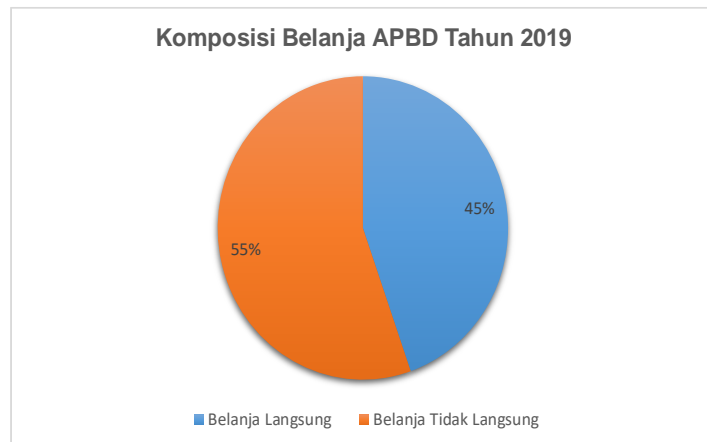
Tabel 1.1 Gambaran Singkat Keuangan Daerah

| No | Uraian | Tahun | | Kenaikan (Rp) |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | |
| 1. | Anggaran Belanja Daerah | 2.991.979.376.190,55 | 3.212.916.766.996,22 | 220.937.390.805,67 |
| 2. | Anggaran Pendapatan Asli Daerah | 447.461.013.153,00 | 480.737.673.476,00 | 33.276.660.323,00 |

Sumber : BKAD, Tahun 2019



Pada tahun 2019 pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, mengambil kebijakan untuk melunasi tunggakan BPJS Kabupaten



Majalengka dari periode kepemimpinan sebelumnya yaitu tunggakan BPJS selama 3 tahun dari tahun 2014-2016 sebesar Rp.78.301.147.101,00.

Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN di Kabupaten Majalengka mulai tahun 2019 Bupati dan Wakil Bupati Majalengka mengambil kebijakan untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada ASN dengan berbasis kinerja adapun total anggarannya selama 1 tahun sebesar Rp.118.345.468.045,00. Pengukuran kinerja diterapkan berbasis SAKIP dimana seluruh ASN secara berjenjang berkewajiban menyusun Perkin yang dievaluasi capaian kerjanya dalam periode 1 tahun dalam dokumen Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS. Kinerja harian pegawai wajib disusun dan dilaporkan dalam dokumen Laporan Aktivitas Kerja Harian yang akan dinilai dalam periode 1 bulan seiring dengan pemberlakuan absensi online berbasis android. Kinerja pegawai dinilai secara berjenjang dimana pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan secara otomatis Tambahan Penghasilannya akan dipotong. Hal ini merupakan bentuk nyata pemberlakuan *reward and punishment* dalam penerapan SAKIP.



c. Sumber Daya Aparatur

ASN di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 berjumlah 10.844 orang yang terdiri dari 5.257 laki-laki dan 5.587 perempuan. Adapun jenjang pendidikannya sebagaimana terlihat pada table di bawah.

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

| PENDIDIKAN TERAKHIR | 2019 | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD/MI | 45 | 0 | 45 |
| SLTP | 118 | 3 | 121 |
| SLTA | 1087 | 385 | 1472 |
| DIPLOMA I | 11 | 25 | 36 |
| DIPLOMA II | 211 | 279 | 490 |
| DIPLOMA III | 247 | 649 | 896 |
| DIPLOMA IV | 29 | 211 | 240 |
| S1 | 3181 | 3889 | 7070 |
| S2 | 318 | 146 | 464 |
| S3 | 10 | 0 | 10 |
| JUMLAH | 5257 | 5587 | 10844 |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Majalengka, Tahun 2019

**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

| GOLONGAN/RUANG | 2019 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| JUMLAH GOLONGAN I | 52 | 0 | 52 |
| JUMLAH GOLONGAN II | 875 | 468 | 1343 |
| JUMLAH GOLONGAN III | 2379 | 3112 | 5491 |
| JUMLAH GOLONGAN IV | 1951 | 2007 | 3958 |
| JUMLAH | 5257 | 5587 | 10844 |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Majalengka, Tahun 2019



Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka telah memberikan apresiasi yang nyata terhadap kesetaraan gender, dimana perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarir menjadi Aparatur Sipil Negara.

d. Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Majalengka dalam rencana pembangunan Jawa Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning. Terbangunnya Bandara Internasional Jawa Barat, dan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang rencana rampung tahun 2020 dan Aerocity di Kertajati telah menjadikan Majalengka sebagai lokasi yang sangat strategis untuk investasi. BIJB dan Aerocity sendiri merupakan bagian dari rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon). Data statistik sendiri menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi Majalengka mencapai angka yang sangat signifikan yaitu 7,14 persen yang merupakan LPE tertinggi di Jawa Barat.

Terkait kebijakan lokal, aspek yang dipandang strategis pada tahun 2019 adalah janji 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenangkan hati dan dipilih masyarakat Majalengka, yaitu :

1. Program *Rantang Kanyaah* sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan;
2. Penyediaan buku pelajaran SD, SMP secara gratis;
3. Pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan tuntas;
4. Pemberian insentif guru ngaji, guru diniah, imam masjid dan bantuan sarana keagamaan;
5. Dokumen administrasi kependudukan diantar sampai rumah;



6. Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan;
7. Evaluasi besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
8. Peningkatan Tunjangan Kinerja ASN Kabupaten Majalengka;
9. Quick Response Majalengka Raharja.

Janji 100 hari kerja ini telah dipenuhi dan akan terus dilanjutkan serta dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun uraian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Pelaksanaan Janji 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Tahun 2019

| NO. | JANJI 100 HARI KERJA | REALISASI |
|-----|---|---|
| 1. | Program Rantang Kanyaah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan | Kegiatan telah diluncurkan pada 26 Pebruari 2019, berupa penyediaan makanan bagi penduduk usia lanjut dan terlantar setiap hari 2 kali. Pada tahun 2019 diberikan pada 200 orang tersebar di 13 desa dan 10 kecamatan |
| 2. | Penyediaan buku pelajaran SD, SMP secara gratis | Penyediaan buku dan rak buku gratis di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2019 |
| 3. | Pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan tuntas | Pemeriksaan kesehatan gratis oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi langsung rumah-rumah warga. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 30 Januari 2019 |
| 4. | Pemberian insentif guru ngaji, guru diniyah, imam masjid dan bantuan sarana keagamaan | Pemberian insentif bagi imam masjid, guru ngaji, guru diniyah serta bantuan sarana keagamaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2019. |



| NO. | JANJI 100 HARI KERJA | REALISASI |
|-----|--|---|
| 5. | Dokumen administrasi kependudukan diantar sampai rumah | Bekerjasama dengan Kantor Pos, dokumen kependudukan yang sudah jadi diantar ke rumah. Pada periode bulan Januari sampai dengan September 2019, Disdukcapil telah melakukan pencetakan KTP-el sebanyak 102.207 buah. |
| 6. | Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan | Perijinan 1 (satu) hari selesai untuk penerbitan SIUP dan TPD bagi Usaha Mikro Kecil dan surat ijin praktek bagi Tenaga Kesehatan. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 26 Februari 2019. |
| 7. | Evaluasi besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Evaluasi penetapan NJOP PBB-P2 untuk menciptakan rasa keadilan dan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB P2 khususnya di 9 kecamatan dengan memberikan insentif (pengurangan) besaran pajak sebesar 25% bagi Buku I dan II SPPT PBB P2 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati No. 973/Kep.356-BKAD/2018 tentang Pengurangan Besaran Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2019. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 11 Maret 2019. |
| 8. | Peningkatan Tunjangan Kinerja ASN Kabupaten Majalengka | Penetapan Besaran TPP dihitung melalui sistem e-Raharja yang memuat mekanisme yang memuat mekanisme pemberian tambahan Penghasilan. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2019. |
| 9. | Quick Response | Layanan Emergency Call 112 serta sarana laporan |



| NO. | JANJI 100 HARI KERJA | REALISASI |
|-----|-------------------------|---|
| | Majalengka Raharja | masyarakat (SP4N LAPOR). Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2019. |

1.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan

Penentuan prioritas pembangunan satu tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagai *guidelines* dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA RAHARJA”

Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang
RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA

Untuk mencapainya, Kabupaten Majalengka dihadapkan pada permasalahan utama sebagai isu strategis pembangunan. Memperhatikan Isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 berdasarkan pada RKPD tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

A. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing untuk Membentuk Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Bermutu

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah



satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program penguatan pendidikan karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tataran operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 64, Pusling sebanyak 54 dan bidan di Desa 277 orang (PNS dan PTT). Angka-angka tersebut belum termasuk



faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 23 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka keduanya sudah terakreditasi.

Menyikapi hal tersebut diatas, dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Majalengka menambah Puskesmas pembantu sebanyak 9 unit sehingga total Puskesmas pembantu menjadi 73 unit dan mengakreditasi 9 Puskesmas sehingga seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka (32 unit) semuanya telah terakreditasi.

C. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (Kawitwangi).



Untuk mengembangkan sektor pariwisata, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Majalengka diantaranya membangun destinasi wisata terasering Panyaweuyan dan *Tourist Information Centre* (TIC). Berbagai upaya pembangunan pariwisata yaitu pembangunan destinasi wisata, pembangunan

SDM pariwisata dan promosi pariwisata dengan model kolaborasi pentahelix dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media telah berhasil menghantarkan Kabupaten Majalengka mendapatkan berbagai prestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat nasional dan propinsi.

Prestasi tersebut yaitu diantaranya: Juara terbaik 1 Anugrah Pesona Indonesia (API) tahun 2019 kategori Wisata Air Terpopuler "Cikadongdong River Tubing" dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, penghargaan dari Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Kabupaten Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan, Juara 1 Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata pada Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Propinsi Jawa Barat.



Gambar 1.2. Bupati Karna Sobahi menerima piala API Awards 2019 kategori Wisata Air Terpopuler, melalui destinasi wisata Cikadongdong River Tubing Desa Payung Kecamatan Rajagaluh



Gambar 1.3. Bupati Majalengka Menerima Penghargaan Kabupaten Kreatif dari Bekraf RI



D. Operasionalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)

Operasionalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong tumbuhnya sektor industri yaitu peningkatan jumlah industri baru dan peningkatan sektor pariwisata. Dalam konteks pariwisata, BIJB merupakan gerbang masuk wisatawan nasional dan internasional yang akan berkunjung ke Majalengka.

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi pengembangan wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Saat ini Bandara Internasional Jawa Barat sudah mulai beroperasi sebagai gerbang keluar masuk dan lalu lintas penduduk propinsi Jawa Barat dan sekitarnya yang tentunya memberikan peluang dan tantangan tersendiri. BIJB dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon).

E. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pesatnya laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Majalengka pada saat ini, dikhawatirkan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat bertambahnya tingkat kelahiran dan migrasi. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk harus disikapi dengan berbagai upaya untuk mengantisipasi munculnya berbagai masalah kependudukan, seperti kemiskinan, peningkatan jumlah penyakit masyarakat dan ketimpangan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk juga harus



diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah penyakit masyarakat, maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan yang diindikasikan dengan indikator *Gini Ratio* maka dilakukan upaya pemerataan pembangunan berupa sarana prasarana distribusi di wilayah selatan berupa akses jalan dan pasar sebagai fasilitas ekonomi masyarakat. Terkait kemiskinan maka salah satu hal penting untuk pencegahannya adalah penciptaan lapangan kerja sehingga pemerintah diantaranya harus mendorong munculnya industri-industri baru di Kabupaten Majalengka.

Kepadatan penduduk diperkirakan akan terjadi di wilayah tengah dan utara sebagai konsekwensi berkembangnya perkotaan dan industri. Hal ini apabila tidak diantisipasi maka akan memunculkan daerah-daerah kumuh sehingga pembangunan sarana prasarana sanitasi harus menjadi perhatian.

F. Ketahanan Pangan

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, dan pariwisata. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta



penumpang per tahun. Strategi untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan tentunya harus disiapkan untuk menyikapi hal tersebut.

Ketahanan pangan akan terwujud ketika petani bisa terus bercocok tanam dan berproduksi. Motivasi petani tentu saja untuk memperoleh penghidupan secara ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan keuntungan usaha tani dari sektor produksi pertanian. Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian dalam jumlah yang cukup dan harga yang ekonomis sehingga para petani bisa mendapatkan untung. Indikator untuk mengukur hal ini adalah Nilai Tukar Petani.

G. Kemandirian Desa

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting untuk mendorong proses reformasi birokrasi yang memadai. Pelayanan publik yang baik akan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah, sebab itu pelayanan di berbagai sektor harus ditingkatkan. Peningkatan mutu pelayanan pemerintah dalam segala bidang harus terlaksana dengan baik agar setiap warga negara dan penduduk dapat memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik. Pelayan



publik yang cepat, mudah, terjangkau dan berkualitas harus dirasakan oleh masyarakat.

Praktek pelayanan publik yang baik oleh ASN diantaranya bisa dilihat dan diukur dari indikator akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP), akuntabilitas keuangan (Opini BPK) dan Indeks Profesionalitas ASN. Untuk memotivasi agar ASN bisa memberikan pelayanan terbaik serta memiliki semangat kerja, maka pemerintah wajib



Gambar 1.4. Bupati Majalengka menerima penghargaan pelayanan publik dari Menteri PAN-RB

memperhatikan aspek kesejahteraannya, yaitu salah satunya melalui pemberian tunjangan kinerja sesuai standar aturan dari Kemenpan-RB.

Terkait pelayanan publik, berkat berbagai upaya dan inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 Kabupaten Majalengka berhasil meraih dua penghargaan, yaitu Top 30 Instansi Pelayanan Publik Terbaik, sekaligus Top 10 Penghargaan Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 13).



1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 adalah :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Majalengka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang gambaran umum dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Majalengka, isu-isu strategis pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran-lampiran.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Seluruh jajaran pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus disusun oleh pemerintah daerah agar mampu menjawab tuntutan isu lingkungan strategis lokal, nasional, global, dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, pemerintah daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke arah mana Pemerintah Daerah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ke empat dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu difokuskan pada upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif serta kompetitif dalam berbagai bidang, sebagaimana visi yang hendak dicapai pada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka. Dengan demikian visi pembangunan jangka menengah pada tahap ke-4 tentunya harus



mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron dan konsisten. Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA RAHARJA”

Raharja secara harfiah bermakna Sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya.

Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA RAHARJA adalah : “Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera dalam arti :

- Religius** : Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;
- Adil** : Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial;
- Harmonis** : Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan;



Sejahtera : Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.

2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan 5 Misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;
- Misi Kedua : Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- Misi Ketiga : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;
- Misi Keempat : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.
- Misi Kelima : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Penetapan lima misi pembangunan di atas adalah untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.



2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Misi Pertama : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

Tujuan misi pertama yaitu mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama

Misi Kedua : Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Terdapat 2 Tujuan dalam misi kedua, yaitu:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor, dengan sasaran :
 - a. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
 - b. Pengurangan tingkat kemiskinan
2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Misi Ketiga : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah



desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;

Tujuan dalam misi ketiga, yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja
2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN

Misi Keempat : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Tujuan misi keempat, yaitu: mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran

1. Meningkatnya mutu pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
4. Meningkatnya kesejahteraan petani
5. Meningkatnya kunjungan wisata
6. Meningkatnya investasi sektor industri
7. Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa

Misi Kelima : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan .

Tujuan misi kelima yaitu mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan *sasaran* meningkatnya status kemajuan kemandirian desa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Hal lain yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2023 adalah janji-janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat pilkada berupa :

1. Pengentasan kemiskinan melalui Program Renyah (Rantang Kanyaah);
2. Penyediaan buku pelajaran SD,SMP secara gratis;
3. Pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan tuntas;
4. Pemberian insentif guru ngaji, guru diniyah, imam mesjid dan bantuan sarana keagamaan;
5. Pelayanan KTP gratis secara mobile dengan penempatan petugas khusus layanan Adminduk (KK dan KTP) satu orang setiap kecamatan;
6. Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan;
7. Evaluasi pajak bumi dan bangunan;
8. Peningkatan tunjangan kinerja aparatur sipil negara Kabupaten Majalengka;
9. Quick Response Majalengka Raharja.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| Visi : "MAJALENGKA RAHARJA" | | |
|--|--|---|
| Misi | Tujuan | Sasaran |
| Misi Pertama : Memantapkan kualitas kehidupan | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat | Meningkatnya pemahaman,penghayatan, dan pengamalan ajaran agama |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|--|
| <i>beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;</i> | | |
| <i>Misi Kedua : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;</i> | 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | 1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor 2. Pengurangan tingkat kemiskinan |
| | 2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat |
| <i>Misi Ketiga : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para</i> | Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | 1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja 2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik 4. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|--|---|--|
| pemangku kepentingan lainnya; | | |
| Misi Keempat : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | 1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing. | 1. Meningkatnya mutu pendidikan. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 4. Meningkatnya kesejahteraan petani 5. Meningkatnya kunjungan wisata 6. Meningkatnya investasi sektor industri 7. Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa |
| Misi Kelima : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa |
| | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| SASARAN | | INDIKATOR | |
|---------|--|-----------|--|
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | 1 | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah |
| 2 | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | 1 | Indeks Gini |
| | Pengurangan tingkat kemiskinan | 1 | Angka Kemiskinan |
| 3 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 1 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat |
| 4 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | 1 | Nlai SAKIP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | 1 | Opini BPK RI |
| 6 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 7 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | 1 | Indeks Profesionalitas ASN |
| | | 2 | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB |
| 8 | Meningkatnya Mutu pendidikan | 1 | Indeks Pengetahuan |
| 9 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | Indeks Kesehatan |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | 1 | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| SASARAN | | INDIKATOR | |
|---------|--|-----------|----------------------------|
| 11 | Meningkatnya kesejahteraan petani | 1 | Nilai Tukar Petani |
| 12 | Meningkatnya kunjungan wisata | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan |
| 13 | Meningkatnya Investasi sektor Industri | 1 | Jumlah industri baru |
| 14 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | | Jumlah desa tematik |

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Selain itu, Perjanjian Kinerja ditujukan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 1 terdapat 1 sasaran strategis dengan indikator 1 indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, dengan indikator :



- a. Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di rumah ibadah, target 5 persen

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram dan tertib di masyarakat.

Misi 2 terdapat 3 sararan strategis dengan indikator 3 indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor dengan indikator:
 - a. Indeks Gini, target 0,335 poin
2. Pengurangan tingkat kemiskinan, dengan indikator :
 - a. Angka kemiskinan, target 10,48 persen.
3. Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat dengan indikator
 - a. Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat, target 10 Persen

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya

Misi 3 terdapat 4 sararan strategis dengan indikator 5 indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator :
 - a. Nilai Sakip, target Nilai B
 2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan, dengan indikator :
 - a. Opini BPK RI, target WTP Opini
 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Indek Kepuasan Masyarakat, target B Poin
 4. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
 - a. Indeks Profesionalitas ASN, target 89 Poin
-



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

- b. Persentase besaran tunjangan kinerja berdasarkan standar kemenpan RB, target 30 Persen

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani .

Misi 4 terdapat 7 sasaran strategis dengan indikator 7 indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatnya mutu pendidikan, dengan indikator :
 - a. Indeks Pengetahuan, target 58,03 poin
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator :
 - a. Indeks Kesehatan, target 76,53 poin
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman, dengan indikator :
 - a. Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik, target 80,52 Persen
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator :
 - a. Nilai Tukar Petani, target 100 Poin
5. Meningkatnya Kunjungan Wisata, dengan indikator :
 - a. Jumlah Kunjungan Wisatawan, target 619.335 Kunjungan
6. Menigkatnya Investasi Sektor Industri, dengan indikator :
 - a. Jumlah Industri Baru , target 40 Unit
7. Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa, dengan indikator :
 - a. Jumlah desa tematik, target 26 desa

Misi 5 : Membangun Desa Menuju pada Kemandirian dengan Berbasis Potensi Lokal untuk Mewujudkan Peningkatan Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

Misi 5 terdapat 1 sasaran strategis dengan 1 indikator sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa, dengan indikator :
 - a. Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya, target 36 desa

Untuk mewujudkan kinerja tersebut didukung dengan anggaran belanja tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 3.361.968.084.312,75 dengan didukung dengan 32 program.

Untuk selengkapnya Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penjanjian Kinerja Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2.2. di bawah ini

Tabel 2.2.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------------|
| 1. | Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama. | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di rumah ibadah | 5 persen |
| 2. | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. | Indeks Gini | 0,335 poin |
| 3. | Pengurangan tingkat kemiskinan. | Angka kemiskinan | 10,48 persen |
| 4. | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat | 10 persen |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja. | Nilai SAKIP | B nilai |
| 6. | Terwujudnya akuntabilitas keuangan. | Opini BPK-RI | WTP Opini |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B Poin |
| 8. | Meningkatnya profesionalisme kinerja dan kesejahteraan ASN. | 1. Indeks profesionalitas ASN | 89 Poin |
| | | 2. Persentase besaran tunjangan kinerja | 30 persen |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|-----|---|--|---------|-----------|
| | | berdasarkan standar kemenpan RB | | |
| 9. | Meningkatnya mutu pendidikan. | Indeks pengetahuan | 58,03 | poin |
| 10. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | Indeks kesehatan | 76,53 | poin |
| 11. | Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman. | Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | 80,52 | persen |
| 12. | Meningkatnya kesejahteraan petani. | Nilai tukar tani | 100,00 | poin |
| 13. | Meningkatnya kunjungan wisata. | Jumlah kunjungan wisatawan | 619.335 | kunjungan |
| 14. | Meningkatnya investasi sektor industri. | Jumlah industri baru | 40,00 | unit |
| 15. | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa. | Jumlah desa tematik | 26,00 | desa |
| 16. | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 36 | desa |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/pemerintah daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan tersebut berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LAKIP Kabupaten Majalengka ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Sarana bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka memenuhi kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah daerah, ini berarti pemerintah daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Majalengka selaku pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka pada tahun 2018-2023. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2020 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Capaian atas IKU Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 yang menunjukkan capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Dari keseluruhan 5 Misi, 16 Sasaran Strategis, dan 17 Indikator Kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka pada tahun 2019, maka perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya disajikan secara keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET |
|----|--|--|--------|------------|-----------|---------------------|--|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nlai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET |
|------------------|--|---|-----------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan |
| RATA-RATA | | | | | | 113,71 | Sangat Memuaskan |

| Kategori Penilaian | |
|--------------------|------------------|
| > 90 | Sangat Memuaskan |
| > 80 - 90 | Memuaskan |
| >70 - 80 | Sangat Baik |
| >60 - 70 | Baik |
| > 50 - 60 | Cukup |
| >30 - 50 | Kurang |
| 0-30 | Sangat Kurang |

Keterangan :

- Angka indeks gini dan Nilai Tukar Petani tahun 2019 merupakan angka sangat sementara hasil proyeksi Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka dan dinas terkait karena pada tahun 2019 sampai dengan dokumen ini disusun belum ada rilis angka resmi dari BPS Kabupaten Majalengka.
- Indeks profesionalitas ASN capaian kinerjanya tidak bisa dihitung karena capaian tahun 2018 dan tahun 2019 tidak bisa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

dibandingkan disebabkan metode perhitungannya berbeda/berubah, yaitu :

| Rumus Lama | Rumus Baru |
|--|---|
| Berdasarkan kajian sementara tenaga ahli dari BKN | Dasar hukum : Peraturan BKN No. 8 Thn 2019 |
| IP = Koef (1-gaps/persentase ASN yg tdk kompeten) + Koef (kinerja/nilai SKP) + Koef (1-selisih rata-rata gaji dan tunjangan ASN utk jabatan yg sama) + Koef (1-jumlah pelanggaran disiplin). | IP= IP kualifikasi+ IP kompetensi + IP kinerja + IP profesionalitas |

- Capaian indikator kinerja yang ditargetkan semakin menurun dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Secara lebih terperinci sasaran strategis dari misi Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023 diuraikan berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama. Terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | Presentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Bagian Kesra Setda |

Berdasarkan Misi 1 : “Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama” yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran mencapai target, sehingga capaian kinerja misi 1 sebesar 100 persen.

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat

Misi ini terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 1. | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Dinas BMCK, Dinkes, Dinas Perdagangan, Dishub, Dinas LH, Diskominfo, Dinas PPSDA |

Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 1. | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Dinsos, Disnakerin, Dinas PPSDA, Dinas P3AKB, Disdik, Distankan, Dinkes, Dinas KUKM, Kecamatan |

Sasaran 3 : Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|----|---|--------|--------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 1. | Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan |

Dengan demikian Misi Kedua : “Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat” yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 3 (tiga) indikator mencapai target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 133,00 persen.

Misi 3 : **Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.**

Misi 3 terdiri atas 4 (empat) Sasaran Startegis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 1. | Nilai Sakip | Nilai | B | B | 100 | Bappelitbangda, Inspektorat, Diskominfo |

Sasaran 2 : Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | BKAD, Inspektorat |

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Disdukcapil, Diskominfo, DPMPTSP, RSUD Majalengka, RSUD Cideres |

Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN , terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------|-----------|---|----------------------|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak bisa dinilai karena metode perhitungannya berubah | BKPSDM |
| 2. | Presentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan | Persen | 30 | 30 | 100 | BKPSDM |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | 100 | |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

Dengan demikian Misi 3 : “Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya” terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai target, sehingga rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Misi ini terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Mutu Pendidikan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Dinas Pendidikan |

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 1. | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Dinas Kesehatan, Dinas PPSDA, Dinas LH |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| 1. | Presentase Rumah Tangga yang mengakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Dinas PPSDA, Dinas LH |

Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani, terdiri atas 1 (satu) Indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 1. | Nilai Tukar Petani (NTP) | poin | 100 | 100,8 | 100,8 | Dinas Pertanian dan Perikanan |

Sasaran 5 : Meningkatnya Kunjungan Wisata, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 619.335 | 701,335 | 113,24 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | Jumlah Industri Baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Disnakerin, DPMPSTSP |

Sasaran 7 : Meningkatnya Ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---------------------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 1. | Jumlah Desa Tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Dnas Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan |

Dengan demikian Misi 4 : “Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani” terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran mencapai target, sehingga rata-rata capaian untuk misi 4 sebesar 110,80 persen.

Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Misi 5 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | desa | 36 | 52 | 144,44 | DPMD, Kecamatan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Dengan demikian Misi 5 : “Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” terdiri dari 1 (satu) sasaran startegis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 1 (satu) indikator kinerja mencapai target, dengan capaian kinerja misi 5 sebesar 144,44 persen.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2019 sesuai dengan misi 1 sampai dengan 5 dapat diperoleh bahwa rata-rata kinerja sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :

| Misi | Uraian | Capaian/ Rata-Rata Capaian |
|------|---|----------------------------|
| 1. | Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | 100,00 |
| 2. | Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 136,43 |
| 3. | Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | 100 |
| 4. | Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | 109,38 |
| 5. | Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | 144,44 |
| | Rata-rata | 118,05 |



3.1.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Dan Tahun 2019

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 REALISASI | TAHUN 2019 | | PERCEPATAN/ PERLAMBATAN (2019-2018) | REALISASI TAHUN BERJALAN (PER MARET 2020) | STANDAR NASIONAL |
|----|--|--------|----------------------|------------|-----------|--|---|-------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 3 | 5 | 5 | 2 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 2 | Indeks Gini | Poin | 0,337 | 0,335 | 0,331 | 0,006 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 3 | Angka Kemiskinan | Persen | 10,79 | 10,48 | 10,06 | 0,73 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 4 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | -40,61 | 10 | 20,41 | 61,02 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 5 | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | B | Nilainya Sama B, Tapi Skornya Ada Kenaikan Dari 60,82 di Tahun 2018 Menjadi 67,00 di Tahun 2019 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 6 | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | WTP | Tetap | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | B | Nilainya Tetap B. Tapi Skornya Ada Kenaikan Dari 78,58 di Tahun 2018 Menjadi 81,50 di tahun 2019 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 8 | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,25 | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | Belum ada data | Tidak Ada Standar |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 REALISASI | TAHUN 2019 | | PERCEPATAN/ PERLAMBATAN (2019-2018) | REALISASI TAHUN BERJALAN (PER MARET 2020) | STANDAR NASIONAL |
|----|--|-----------|----------------------|------------|-----------|---|---|-------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Tidak Ada Standar |
| 9 | Indeks Pengetahuan | Poin | 56,98 | 58,03 | 57,55 | 0,57 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 10 | Indeks Kesehatan | Poin | 76,43 | 76,53 | 76,88 | 0,45 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 11 | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 65,14 | 80,52 | 68,47 | 3,33 | 68,47 | Tidak Ada Standar |
| 12 | Nilai Tukar Petani | Poin | 99,67 | 100 | 100,8 | 1,13 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 13 | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 589843 | 619,335 | 701335 | 111492 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 14 | Jumlah industri baru | Unit | 45 | 40 | 56 | 11 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |
| 15 | Jumlah desa tematik | Desa | 3 | 26 | 33 | 30 | 33 | Tidak Ada Standar |
| 16 | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 0 | 36 | 52 | 52 | Belum ada data | Tidak Ada Standar |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 tersebut diuraikan ke dalam tiap Misi, sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

Misi 1 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | (Percepatan/Perlambatan) (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Presentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | persen | 3 | 5 | 2 | Bagian Kesra Setda |

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Misi 2 terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|-------------------------------|---|
| 1. | Indeks Gini | Poin | 0,337 | 0,331 | 0,006 | Dinas BMCK, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dishub, Dinas LH, Diskominfo, Dinas PPSDA |

Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|-------------------------------|--|
| 1. | Angka Kemiskinan | Persen | 10,79 | 10,06 | 0,73 | Dinsos, Disnakerin, Dinas PPSDA, Dinas P3AKB, Distankan, Disdik, Dinkes, Dinas KUKM, Kecamatan |

Sasaran 3 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Presentase penurunan jumlah penyakit Masyarakat | Persen | -40,61 | 20,41 | 61,02 | Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan |

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.

Misi 3 terdiri atas 4 (empat) Sasaran Startegis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|--|---|
| 1. | Nilai Sakip | Nilai | B | B | Nilainya sama B, tapi dari skornya ada kenaikan dari 60,82 di tahun 2018 menjadi 67,00 di tahun 2019 | Bappelitbangda, Inspektorat, Diskominfo |

Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Kenaikan/ penurunan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | Tetap | BKAD, Inspektorat |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------|--------|------------|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | Tetap. Tapi Skornya Ada Kenaikan dari 78,58 di Tahun 2018 Menjadi 81,50 Pada Tahun 2019 | Disdukcapil, Diskominfo, DPMPSTP |

Sasaran 4 : Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|-----------------------------------|------------|------------|--|----------------------|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,25 | 78,00 | Tidak bisa dinilai karena metode perhitungan berubah | BKPSDM |
| 2. | Presentase Tunjangan berdasarkan Kemenpan RB | Besaran Kinerja Standar Persen | | 30 | 30 | BKPSDM |

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Misi 4 terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu pendidikan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Indeks Pengetahuan | Poin | 56,98 | 57,55 | 0,57 | Dinas Pendidikan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|----------------------------|--|
| 1. | Indeks Kesehatan | Poin | 76,43 | 76,88 | 0,45 | Dinas Kesehatan, Dinas PPSDA, Dinas LH |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | Persen | 65,14 | 68,47 | 3,33 | Dinas PPSDA, Dinas LH |

Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan petani, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Nilai Tukar Petani | Poin | 99,67 | 100,80 | 1,13 | Distankan |

Sasaran 5 : Meningkatnya kunjungan wisata, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 589.843 | 701.335 | 111.492 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------|--------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Jumlah Industri Baru | Unit | 45 | 56 | 11 | Disnakerin, DPMPSTSP |

Sasaran 7 : Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---------------------|--------|------------|------------|----------------------------|--|
| 1. | Jumlah Desa Tematik | Desa | 3 | 33 | 30 | Dinas Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan |

Misi 5 : **Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**

Misi 5 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Percepatan/Perlambatan (%) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya | desa | 0 | 52 | 52 | DPMD, Kecamatan |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode RPJMD/Tahun 2023)

Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode RPJMD/ tahun 2023) disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Akhir Tahun RPJMD 2019-2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | DATA TAHUN SEBELUMNYA (REALISASI) | | REALISASI 2019 | TARGET AKHIR TAHUN RPJMD (2023) | CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN RPJMD (%) |
|------------------|--|-----------|-----------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | 2017 | 2018 | | | |
| 1 | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | N/A | 3 | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Indeks Gini | Poin | 0,351 | 0,337 | 0,331 | 0,328 | 99,09 |
| 3 | Angka Kemiskinan | Persen | 12,6 | 10,79 | 10,06 | 8,48 | 81,37 |
| 4 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | -17,49 | -40,61 | 20,41 | 50 | 40,82 |
| 5 | Nilai SAKIP | Nilai | CC | B | B | A | 0,84 |
| 6 | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | 100 |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | B | B | 100 |
| 8 | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,25 | 88,25 | 78,00 | 90,00 | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah |
| 9 | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 0 | 0 | 30 | 50 | 60,00 |
| 10 | Indeks Pengetahuan | Poin | 56,83 | 56,98 | 57,55 | 61,19 | 94,05 |
| 11 | Indeks Kesehatan | Poin | 75,98 | 76,43 | 76,88 | 77,54 | 99,15 |
| 12 | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 63,43 | 65,14 | 68,47 | 81,65 | 83,86 |
| 13 | Nilai Tukar Petani | Poin | N/A | 99,67 | 100,80 | 103,76 | 97,15 |
| 14 | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 650880 | 589843 | 701335 | 906769 | 77,34 |
| 15 | Jumlah industri baru | Unit | N/A | 45 | 56 | 40 | 140,00 |
| 16 | Jumlah desa tematik | Desa | 3 | 3 | 33 | 26 | 126,92 |
| 17 | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 0 | 0 | 52 | 221 | 23,53 |
| RATA-RATA | | | | | | | 82,76 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan akhir tahun RPJMD (tahun 2023) diurai berdasarkan misi, sasaran dan indikator kinerja, adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

Misi 1 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Presentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di rumah ibadah | poin | 5 | 5 | 100 | Bagian Kesra Setda |

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Misi 2 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 1. | Indeks Gini | Poin | 0,331 | 0,328 | 99,09 | Dinas BMCK, Dinkes, Dinas Perdagangan, Dishub, Dinas LH, Diskominfo, Dinas PPSDA |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 1. | Angka kemiskinan | Persen | 10,06 | 8,48 | 81,37 | Dinsos, Disnakerin, Dinas PPSDA, Dinas p3AKB, Distankan, Disdik, Dinkes, Dinas KUKM, Kecamatan |

Sasaran 2 : Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|------------|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 20,41 | 50 | 40,82 | Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan |

Misi 3 : **Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.**

Misi 3 terdiri atas 4 (empat) Sasaran Startegis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 1. | Nilai Sakip | poin | B | A | 0,84 | Bappelitbangda, Inspektorat, Diskominfo |

Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | BKAD, Inspektorat |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 1. | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Disdukcapil, Diskominfo, DPMPSTP |

Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 78 | 90 | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berbeda | BKPSDM |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 2. | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 50 | 60,00 | BKPSDM |

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Misi 4 terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu pendidikan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Indeks Pengetahuan | Poin | 57,55 | 61,19 | 94,05 | Dinas Pendidikan |

Sasaran 2 : Meningkat Derajat Kesehatan Masyarakat, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Indeks Kesehatan | Poin | 76,43 | 77,54 | 99,15 | Dinas Kesehatan, PPSDA, Dinas LH |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|------------|------------|---|-----------------------|
| 1. | Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | Persen | 65,14 | 81,65 | 83,86 | Dinas PPSDA, Dinas LH |

Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan petani, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--------|------------|------------|---|-------------------------------|
| 1. | Nilai Tukar Petani | Poin | 100,80 | 103,76 | 97,15 | Dinas pertanian dan perikanan |

Sasaran 5 : Meningkatnya kunjungan wisata, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------|-----------|------------|------------|---|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 701.335 | 906.769 | 77,34 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Jumlah Industri Baru | Unit | 56 | 40 | 140 | Disnakerin, DPMPSTP |

Sasaran 7 : Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 1. | Jumlah desa tematik | Desa | 33 | 26 | 126,92 | Dinas Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan |

Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Misi 5 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Tahun RPJMD (2023) | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|------------|------------|---|----------------------|
| 1. | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | desa | 52 | 221 | 23,53 | DPMD, Kecamatan |

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target akhir periode RPJMD tahun 2023 di atas diperoleh bahwa rata-rata kinerja sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:

| Misi | Uraian | Rata-Rata Capaian (%) |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | 100 |
| 2. | Meneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 73,76 |
| 3. | Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | 65,21 |
| 4. | Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | 102,64 |
| 5. | Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | 23,53 |
| Rata-Rata (%) | | 73,03 |

3.1.4 Benchmark Kinerja

Dalam upaya untuk melakukan *benchmark* kinerja, beberapa capaian indikator kinerja dibandingkan dengan capaian indikator kinerja di kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Barat yang diperoleh datanya sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Indikator Kinerja dengan Wilayah Lain

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | REALISASI JABAR DAN KAB/KOTA SEKITAR TAHUN 2019 | | | | REALISASI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 | KET |
|-------------------|--------|---|---------------|--------------|----------------|---|-----|
| | | PROV. JABAR | KAB. KUNINGAN | KAB. CIREBON | KAB. INDRAMAYU | | |
| Angka Kemiskinan | Persen | 6,91 | 11,41 | 9,94 | 11,11 | 10,06 | - |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | REALISASI JABAR DAN KAB/KOTA SEKITAR TAHUN 2019 | | | | REALISASI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 | KET |
|--|---------------|---|---------------|--------------|----------------|---|---|
| | | PROV. JABAR | KAB. KUNINGAN | KAB. CIREBON | KAB. INDRAMAYU | | |
| Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10,84 | 55 | 63,22 | 0,91 | 20,41 | Data dari Datin Satpol PP Provinsi Jawa Barat |
| Nilai SAKIP | Nilai | A | B | B | B | B | - |
| Opini BPK RI | Opini | 8X WTP | 5X WTP | 3X WTP | 4X WTP | WTP | Majalengka Sudah 6X WTP Berturut-turut |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | B | B | B | - |
| Indeks Pengetahuan | Poin | 61,75 | 58,13 | 56,37 | 53,97 | 57,55 | - |
| Indeks Kesehatan | Poin | 81,31 | 82,08 | 79,72 | 79,03 | 76,88 | - |
| Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | Persen | 72,44 | 88,96 | 83,66 | 72,85 | 68,47 | - |
| Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 64610832 | 427994 | 453657 | 1501043 | 701335 | - |
| INDIKATOR LAINNYA DILUAR IKU | | | | | | | |
| <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</i> | <i>Persen</i> | <i>5,07</i> | <i>6,56</i> | <i>4,86</i> | <i>3,20</i> | <i>7,14</i> | <i>Sumber : Prov. Jabar dalam Angka 2020</i> |
| <i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i> | <i>Persen</i> | <i>7,73</i> | <i>9,61</i> | <i>10,28</i> | <i>8,28</i> | <i>4,37</i> | <i>Sumber : Prov. Jabar dalam Angka 2020</i> |
| <i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</i> | <i>Persen</i> | <i>65,07</i> | <i>61,31</i> | <i>65,38</i> | <i>67,89</i> | <i>67,97</i> | <i>Sumber : Prov. Jabar dalam Angka 2020</i> |

Dari table perbandingan diatas terlihat bahwa beberapa indikator sudah relatif cukup baik dari kabupaten sekitar, ada juga yang sama, serta ada beberapa yang capaiannya masih dibawah. Hal ini harus menjadi



penyemangat Pemerintah Kabupaten Majalengka agar kedepan bisa berkinerja lebih baik lagi.

3.1.5 Kinerja Lainnya

Kinerja lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2019, yaitu :

| No. | Jenis Kinerja | Uraian |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Inisiatif dalam pemberantasan korupsi | <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan. Hal ini merupakan bagian dari janji 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Telah <i>launching</i> pada tanggal 26 Pebruari 2019. Implementasinya yaitu perizinan 1 hari selesai untuk penerbitan SIUP dan TDP bagi Usaha Mikro Kecil dan surat izin praktek bagi tenaga kesehatan yang dilakukan secara terbuka dan transparan.2. Mengundang KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk turut mengawasi proses promosi, mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.3. Quick Response Majalengka Raharja yang didalamnya termasuk sarana laporan masyarakat (SP4N LAPOR). Masyarakat bisa mengadukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN termasuk jika terdapat dugaan aktivitas korupsi. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2019 dan mendapat penghargaan dari Kemenpan-RB. |
| 2. | Inovasi dalam manajemen kinerja | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Tunjangan Kinerja ASN Kabupaten Majalengka. Penetapan Besaran TPP dihitung melalui sistem e-Raharja yang memuat mekanisme pemberian tambahan Penghasilan. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 4 Februri 2019.2. Absensi online bagi ASN berbasis android dan pelaporan kinerja harian setiap individu. Hal ini diterapkan sebagai pendukung pelaksanaan pemberian TPP.3. Pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan tuntas, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi langsung rumah-rumah warga. Kegiatan ini telah diluncurkan pada tanggal 30 Januari 20194. Dokumen administrasi kependudukan diantar sampai rumah. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Pos, yaitu dokumen kependudukan yang sudah jadi diantar ke rumah. Pada periode bulan |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| No. | Jenis Kinerja | Uraian |
|-----|-------------------------|--|
| | | Januari sampai dengan September 2019, Disdukcapil telah melakukan pencetakan KTP-el sebanyak 102.207 buah. |
| 3. | Penghargaan-penghargaan | Pada tahun 2019 Kabupaten Majalengka berhasil memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional dan provinsi. Daftar penghargaan yang diperoleh disajikan pada lampiran dokumen ini. |

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja secara singkat disajikan pada table berikut :

Tabel 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN |
|---|--|--|-------------|--|---|
| Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 100 | 2 (percepatan) | Komitmen kepala daerah dalam pengambilan kebijakan, penganggaran kegiatan dan komunikasi dengan tokoh agama |
| Misi 2 : Meneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | 101,19 | 0,006 (percepatan) | Pembangunan dari berbagai aspek secara merata ke seluruh pelosok wilayah secara bertahap |
| | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 104,01 | 0,73 (percepatan) | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan |
| | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 204,1 | 61,02 (percepatan) | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait serta meningkatnya kesadaran masyarakat |
| Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | 100 | Nilainya Sama B, Tapi Skornya Ada Kenaikan Dari 60,82 di Tahun | Proses perbaikan secara bertahap pada aspek perencanaan, evaluasi dan |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN |
|--|---|---|--------------------|--|---|
| pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | | | | 2018 Menjadi 67,00 di Tahun 2019 (tetap) | pelaporan |
| | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | 100 | Tetap | Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100 | Tetap | Peningkatan kualitas layanan oleh seluruh OPD |
| | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | Tidak bisa dinilai keberhasilan atau kegagalannya karena perubahan pada metode perhitungan sehingga tidak bisa dibandingkan |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | 100 | 30 (percepatan) | Komitmen dari kepala daerah |
| Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 99,17 | 0,57 (percepatan) | Digalakkannya berbagai program pendidikan termasuk pemberian beasiswa atau bantuan peralatan sekolah kepada siswa tidak mampu |
| | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 100,46 | 0,45 (percepatan) | Digalakkannya berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | 85,03 | 3,33 (percepatan) | Komitmen daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan akses sanitasi yang baik bagi masyarakat |
| | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | 100,80 | 1,13 (percepatan) | Digalakkannya berbagai program/ kegiatan pertanian berupa fasilitasi alsintan, bimtek, penyediaan irigasi dan pengendalian hama |
| | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 113,24 | 111492 (percepatan) | Dibangunnya sarana prasarana wisata, daya tarik wisata dan digalakkannya promosi wisata dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait |
| | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | 140,00 | 11 (percepatan) | Kebijakan untuk mempermudah perijinan dan meningkatnya nilai strategis Majalengka dengan telah dibangunnya berbagai infrastruktur seperti |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN |
|--|--|---|-------------|---|---|
| | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 126,92 | 30 (percepatan) | jalan tol dan bandara Meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan pariwisata |
| Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 144,44 | 52 (percepatan) | Adanya peningkatan kualitas aparatur desa dan BPD |

Adapun secara lebih terperinci analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja, adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama. Terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|--|-------------|---|
| 1. | Presentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di rumah ibadah | 100 | Komitmen kepala daerah dalam pengambilan kebijakan, penganggaran kegiatan dan komunikasi dengan tokoh agama |

Berdasarkan Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja Misi pertama dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian (%) |
|-----|---|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | Tercapai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Dihitung | Tidak Ada Target | |
| 1. | Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran agama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |

berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 1** : **Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tersebut sudah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran mencapai angka 100 persen.

Misi 2 : Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Sasaran 1 : Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|-------------------|-------------|--|
| 1. | Indeks Gini | 101,19 | Pembangunan dari berbagai aspek secara merata ke seluruh pelosok wilayah secara bertahap |

Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|----|-------------------|-------------|---|
| 1. | Angka Kemiskinan | 104,01 | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Sasaran 3 : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|----|---|-------------|---|
| 1. | Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 204,1 | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait serta meningkatnya kesadaran masyarakat |

Berdasarkan Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja Misi kedua dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian/Rata-Rata Capaian |
|-----|--|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Tercapai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Dihitung | Tidak Ada Target | |
| 1. | Sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | 1 | 1 | | - | - | 101,19 |
| 2. | Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan | 1 | 1 | | | | 104,01 |
| 3. | Sasaran 3 : Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 1 | 1 | | - | - | 204,1 |
| | Jumlah | 3 | 3 | | - | - | 154,05 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk misi kedua **sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor** dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,19 persen.

Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,01 persen.



Sasaran 3 : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 204,1 persen.

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|-------------------|-------------|---|
| 1. | Nilai Sakip | 100 | Nilai Sakip 2019 Pemda tercapai sesuai target |

Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|-------------------|-------------|---|
| 1. | Opini BPK RI | 100 | Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|----------------------------------|-------------|---|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100 | Peningkatan kualitas layanan oleh seluruh OPD |

Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN, terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan analisis



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Tidak Bisa Dinilai Krn Metode Perhitungan Berubah | Tidak bisa dinilai keberhasilan atau kegagalannya karena perubahan pada metode perhitungan sehingga tidak bisa dibandingkan |
| 2. | Presentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | 100 | Komitmen dari kepala daerah |

Berdasarkan Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja Misi ke tiga dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian/Rata-Rata Capaian |
|-----|--|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Tercapai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Dihitung | Tidak Ada Target | |
| 1. | Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja | 1 | 1 | | 0 | - | 100 |
| 2. | Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan | 1 | 1 | | 0 | | 100 |
| 3. | Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1 | 1 | | | | 100 |
| 4. | Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | 2 | 1 | | 1 | - | 100 |
| | Jumlah | 5 | 4 | | 1 | 0 | 100 |



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100 persen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, 1 (satu) dan indikator kinerja telah mencapai target dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100 persen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan indikator kinerja telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100 persen

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN**, mencapai target kinerja 100 persen.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pendidikan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|--------------------|-------------|---|
| 1. | Indeks Pengetahuan | 99,17 | Digalakkannya berbagai program pendidikan termasuk pemberian beasiswa atau bantuan peralatan sekolah kepada siswa tidak mampu |

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|----|-------------------|-------------|--|
| 1. | Indeks Kesehatan | 100,46 | Digalakkannya berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan |

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan |
|-----|--|-------------|--|
| 1. | Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | 85,03 | Komitmen daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan akses sanitasi yang baik bagi masyarakat |

Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan petani, terdiri atas 1 (satu) Indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|--------------------|-------------|---|
| 1. | Nilai Tukar Petani | 100,80 | Digalakkannya berbagai program/ kegiatan pertanian berupa fasilitasi alsintan, bimtek, penyediaan irigasi dan pengendalian hama |

Sasaran 5 : Meningkatnya kunjungan wisata, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|----------------------------|-------------|---|
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 113,24 | Dibangunnya sarana prasarana wisata, daya tarik wisata dan digalakkannya promosi wisata dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait |

Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|----------------------|-------------|---|
| 1. | Jumlah Industri Baru | 140 | Kebijakan untuk mempermudah perijinan dan meningkatnya nilai strategis Majalengka dengan telah dibangunnya berbagai infrastruktur seperti jalan tol dan bandara |

Sasaran 7 : Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|---------------------|-------------|--|
| 1. | Jumlah desa tematik | 126,92 | Meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan pariwisata |

Berdasarkan Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja Misi ke Empat dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian/Rata-Rata Capaian |
|-----|--|------------------|--------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Terca Pai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Di Hitung | Tidak Ada Target | |
| 1. | Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu pendidikan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,17 |
| 2. | Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,46 |
| 3. | Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 85,03 |
| 4. | Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan petani | 1 | 1 | - | - | - | 100,80 |
| 5. | Sasaran 5 : Meningkatnya kunjungan wisata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,24 |
| 6. | Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri | 1 | 1 | 0 | - | - | 140,00 |
| 7. | Sasaran 7 : Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | 1 | 1 | - | - | - | 126,92 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian/Rata-Rata Capaian |
|-----|---------|------------------|--------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Terca Pai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Di Hitung | Tidak Ada Target | |
| | Jumlah | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 110,8 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 1 : Meningkatkan Mutu pendidikan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan indikator kinerja tersebut capaian kinerjanya sebesar 99,17 persen

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan indikator kinerja tersebut telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 100,46 persen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman** dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut capaian kinerjanya 85,03 persen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Sasaran 4 : Meningkatkan kesejahteraan petani** dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan indikator kinerja tersebut telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 100,80 persen.

Dari tabel di atas ternyata **Sasaran 5 : Meningkatkan kunjungan wisata**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 113,24 persen.

Dari tabel di atas ternyata **Sasaran 6 : Meningkatkan Investasi Sektor Industri**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 140 persen.

Dari tabel di atas untuk **Sasaran 7 : Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa**, dengan 1 (satu) indikator kinerja dan telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 126,92 persen.



Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sasaran : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian tersebut sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan |
|-----|---|-------------|---|
| 1. | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 144,44 | Adanya peningkatan kualitas aparatur desa dan BPD |

Berdasarkan Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase capaian kinerja Misi ke Lima dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Ketercapaian | | | | Capaian/Rata-Rata Capaian |
|-----|---|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Tercapai | Tidak Tercapai | Tidak Bisa Dihitung | Tidak Ada Target | |
| 1 | Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | 1 | 1 | - | - | - | 144,44 |
| | Jumlah | 1 | 0 | - | - | - | 144,44 |

Dari tabel di atas ternyata **Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa**, terdiri atas 1 (dua) indikator kinerja, dan telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 144,44 persen.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dari 2 pendekatan yaitu pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

dengan capaian indicator kinerja serta pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik program/kegiatan.

a. Pendekatan Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Capaian Indikator Kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Efisiensi Sumber Daya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN TAHUN 2019 | | | | EFISI-ENSI | KET |
|----|--|--|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|---------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (%) | CAPAIAN KINERJA (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 1.297.825.000 | 962.473.500 | 74,16 | 100,00 | 25,84 | Efisien |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | 422.587.634.865 | 412.273.287.833 | 97,56 | 101,19 | 3,63 | Efisien |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 9.077.204.676 | 8.848.093.558 | 97,48 | 104,01 | 6,53 | Efisien |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 8.918.825.500 | 8.589.478.127 | 96,31 | 204,10 | 107,79 | Efisien |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nlai SAKIP | 1.797.095.000 | 1.397.429.300 | 77,76 | 100,00 | 22,24 | Efisien |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | 298.300.000 | 202.355.800 | 67,84 | 100,00 | 32,16 | Efisien |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN TAHUN 2019 | | | | EFISI-ENSI | KET |
|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (%) | CAPAIAN KINERJA (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 224.969.352.445 | 202.976.358.806 | 90,22 | 100,00 | 9,78 | Efisien |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 7.243.969.500 | 6.330.484.533 | 87,39 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempan RB | 499.400.000 | 451.290.000 | 90,37 | 100,00 | 9,63 | Efisien |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 430.468.979.500 | 413.824.970.179 | 96,13 | 99,17 | 2,38 | Efisien |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 116.436.199.534 | 96.976.061.390 | 83,29 | 100,46 | 17,17 | Efisien |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | 7.688.336.000 | 7.463.340.000 | 97,07 | 85,03 | -12,04 | Kurang Anggaran |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | 285.000.000 | 283.341.885 | 99,42 | 100,80 | 1,38 | Efisien |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 10.283.591.800 | 8.869.324.087 | 86,25 | 113,24 | 26,99 | Efisien |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | 26.309.656.000 | 24.338.236.494 | 92,51 | 140,00 | 47,49 | Efisien |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 233.256.000 | 188.219.000 | 80,69 | 126,92 | 46,23 | Efisien |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 1.978.975.000 | 1.858.627.826 | 93,92 | 144,44 | 50,52 | Efisien |
| JUMLAH ATAU RATA-RATA | | | 1.270.373.600.820 | 1.195.833.372.318 | 88,73 | 113,71 | 24,86 | Efisien |



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan dengan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Majalengka telah mampu melakukan efisiensi sebesar 24,86 persen.

b. Pendekatan Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Capaian Realisasi Fisik

Selanjutnya pada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik, penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika hasil pembagian realisasi fisik dengan realisasi keuangan lebih besar dari 1 (satu), sebaliknya tidak efisien apabila hasil pembagiannya lebih kecil dari 1 (satu) atau sama dengan 1 (satu). Realisasi keuangan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pada tahun 2019 sebesar Rp 1.195.833.372.318,00 (realisasi keuangan 88,73 persen, realisasi fisik 100,00 persen) adapun realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp1.240.870.106.885,45 (realisasi keuangan 91,86 persen, realisasi fisik 99,80 persen). Tahun 2019 capaian efisiensi dari perbandingan realisasi keuangan dan realisasi fisik, yaitu 1,14 persen lebih tinggi dari tahun 2019 dengan nilai efisiensi 1,09.

Secara rinci perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

Tabel 3.7.1 Perbandingan Realisasi Keuangan dan Fisik

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN TAHUN 2019 | | | | EFISIENSI | KET |
|----|--|--|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI FISIK (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8=7/6 | 9 |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 1.297.825.000 | 962.473.500 | 74,16 | 100,00 | 1,35 | Efisien |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | 422.587.634.865 | 412.273.287.833 | 97,56 | 100,00 | 1,03 | Efisien |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 9.077.204.676 | 8.848.093.558 | 97,48 | 100,00 | 1,03 | Efisien |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 8.918.825.500 | 8.589.478.127 | 96,31 | 100,00 | 1,04 | Efisien |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nlai SAKIP | 1.797.095.000 | 1.397.429.300 | 77,76 | 100,00 | 1,29 | Efisien |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | 298.300.000 | 202.355.800 | 67,84 | 100,00 | 1,47 | Efisien |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 224.969.352.445 | 202.976.358.806 | 90,22 | 100,00 | 1,11 | Efisien |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 7.243.969.500 | 6.330.484.533 | 87,39 | 100,00 | 1,14 | Efisien |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemnpan RB | 499.400.000 | 451.290.000 | 90,37 | 100,00 | 1,11 | Efisien |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 430.468.979.500 | 413.824.970.179 | 96,13 | 100,00 | 1,03 | Efisien |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 116.436.199.534 | 96.976.061.390 | 83,29 | 100,00 | 1,20 | Efisien |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN TAHUN 2019 | | | | EFISIENSI | KET |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI FISIK (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8=7/6 | 9 |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | 7.688.336.000 | 7.463.340.000 | 97,07 | 100,00 | 1,03 | Efisien |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | 285.000.000 | 283.341.885 | 99,42 | 100,00 | 1,01 | Efisien |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 10.283.591.800 | 8.869.324.087 | 86,25 | 100,00 | 1,16 | Efisien |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | 26.309.656.000 | 24.338.236.494 | 92,51 | 100,00 | 1,08 | Efisien |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 233.256.000 | 188.219.000 | 80,69 | 100,00 | 1,24 | Efisien |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 1.978.975.000 | 1.858.627.826 | 93,92 | 100,00 | 1,06 | Efisien |
| JUMLAH ATAU RATA-RATA | | | 1.270.373.600.820 | 1.195.833.372.318 | 88,73 | 100,00 | 1,14 | |

Tabel 3.7.2 Perbandingan Tahun 2018 dan 2019

| No. | Tahun | Aspek Keuangan Pendukung Kinerja | | | Rata-Rata Realisasi Fisik (%) | Efisiensi | Ket. |
|-----|-------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7=6/5 | 7 |
| 1 | 2018 | 1.350.857.353.763,45 | 1.240.870.106.885,45 | 91,86 | 99,80 | 1,09 | Efisien |
| 2 | 2019 | 1.270.373.600.820 | 1.195.833.372.318 | 88,73 | 100,00 | 1,14 | Efisien |



3.1.8 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian penyataan kinerja menjelaskan hubungan antara capaian sasaran strategis untuk masing-masing misi dengan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dimaksud, diuraikan sebagai berikut :



Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

| Misi | Sasaran | | Capaian | Didukung Program | Realisasi 2019 | | |
|------|-----------|--|---------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| 1. | Sasaran | Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama | 100 | | | | |
| | Indikator | Presentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 100 | Peningkatan Sumber daya Aparatur | 1.297.825.000 | 962.473.500 | 100,00 |
| | | | | | | | |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk **Misi : 1 Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama**, yang terdiri atas 1 sasaran strategis dan berhasil mencapai target.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | | |
|------|-----------|---|-------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| 2. | Sasaran 1 | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | 101,09 | | | | | |
| | | Indikator | Indeks Gini | 101,19 | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan | 366.625.174.700 | 361.464.708.683 | 100 |
| | | | | | Penguatan tata Kelola Kesehatan | 28.053.188.000 | 24.445.559.923 | 100 |
| | | | | | Program Pengembangan Sektor Perdagangan | 2.846.858.000 | 2.846.858.000 | 100 |
| | | | | | Program Optimalisasi Sumber Daya | 397.389.000 | 396.330.000 | 100 |
| | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 6.734.090.360 | 6.604.314.901 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | | |
|------|-----------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | | | | Program Administrasi Perkantoran | 3.110.001.340 | 2.681.088.472 | 100 | |
| | | | | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan | 1.309.049.000 | 1.292.944.300 | 100 | |
| | | | | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 6.924.542.200 | 6.335.310.704 | 100 | |
| | | | | Program Pengendalian Tata Ruang | 6.330.944.000 | 5.956.033.150 | 100 | |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan | 93.898.265 | 92.679.700 | 100 | |
| | | | | Program Peningkatan | 162.500.000 | 157.460.000 | 100 | |
| | Sasaran 2 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | | 104,01 | | | | |
| | | Indikator | Angka Kemiskinan | 104,01 | Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 858.691.000 | 855.832.050 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | |
|------|---------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| | | | | | Jaminan Sosial | 3.150.495.350 | 2.998.938.260 | 100 |
| | | | | | Penguatan Adat | 40.587.500 | 40.587.500 | 100 |
| | | | | | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 14.636.000 | 14.636.000 | 100 |
| | | | | | Pembinaan Lingkungan Sosial | 1.000.000.000 | 978.305.800 | 100 |
| | | | | | Peningkatan Kompetensi Masyarakat | 361.150.000 | 359.080.000 | 100 |
| | | | | | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 2.344.987.826 | 2.330.130.000 | 100 |
| | | | | | Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 771.957.000 | 752.230.448 | 100 |
| | | | | | Penguatan tata kelola pendidikan | 465.250.000 | 458.301.500 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | | | |
|------|-----------|--|-------------------|---|----------------------|---|---------------|---------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | | |
| | | | | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 69.450.000 | 60.052.000 | 100 | | |
| | Sasaran 3 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 204,1 | | | | | | |
| | | Indikator | | Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 204,1 | Program Penguatan Adat | 6.852.786.500 | 6.622.358.500 | 100 |
| | | | | | | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1.679.889.000 | 1618533027 | 100 |
| | | | | | | Pengembangan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 386.150.000 | 348.586.600 | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk **Misi : 2 Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat**, yang terdiri atas 3 sasaran strategis semua sasaran strategis berhasil mencapai target.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | |
|------|-----------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------|---------------|-----------|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| 3. | Sasaran 1 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | 100 | | | | |
| | | Indikator 1 | Nilai Sakip | 100 | | | |
| | | | | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 100.000.000 | 80.053.500 | 100 |
| | | | | Program Administrasi Perkantoran | 1.658.245.000 | 1.293.950.800 | 100 |
| | | | | Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 38.850.000 | 23.425.000 | 100 |
| | | | | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | | |
|------|-----------|--|----------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | Sasaran 2 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | | | | | | |
| | | Indikator | Opini BPK RI | 100 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 170.750.000 | 159.385.800 | 100 |
| | | | | | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 127.550.000 | 42.970.000 | 100 |
| | Sasaran 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | 100 | | | | |
| | | Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 927.459.000 | 891.626.440 | 100 |
| | | | | | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 4.311.005.000 | 4.218.628.032 | 100 |
| | | | | | Program Administrasi Perkantoran | 3.000.000 | 2.930.000 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi Tahun 2019 | | | |
|------|-----------|---|--|---|------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | | | | Program Penguatan Pelayanan Dasar dan Rujukan | 110.689.358.187 | 103.155.284.587 | 100 | |
| | | | | Program Penguatan Pelayanan Dasar dan Rujukan | 109.038.530.258 | 94.707.889.747 | 100 | |
| | Sasaran 4 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | | 44,07 | | | | |
| | | Indikator 1 | Indeks Profesionalitas ASN | 88,14 | Peningkatan Sumber daya Aparatur | 7.243.969.500 | 6.330.484.533 | 100 |
| | | Indikator 2 | Presentase Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan standar Kemenpan RB | 100 | Peningkatan Kesejahteraan Aparatur | 499.400.000 | 451.290.000 | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk **Misi : 3 Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya**, yang terdiri atas 4 sasaran strategis dan seluruh sasaran strategis mencapai target.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi | | | |
|------|-----------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| 4. | Sasaran 1 | Meningkatnya Mutu pendidikan | 99,17 | | | | | |
| | | Indikator | Indeks Pengetahuan | 99,17 | Program Pendidikan Dasar | 141.096.347.250 | 133.749.914.187 | 100 |
| | | | | | Program Pendidikan PAUD | 2.709.300.000 | 2.696.377.085 | 100 |
| | | | | | Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan | 145.566.985.000 | 143.628.764.720 | 100 |
| | | | | | Program Pendidikan Dasar | 141.096.347.250 | 133.749.914.187 | 100 |
| | Sasaran 2 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 100,46 | | | | | |
| | | Indikator | Indeks Kesehatan | 100,46 | Penguatan Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan | 106.779.949.034 | 87.802.236.640 | 100 |
| | | | | | Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga | 4.403.221.500 | 4.037.635.750 | 100 |
| | | | | | Program Pemenuhan Utilitas | 5.253.029.000 | 5.136.189.000 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi | | |
|------|-----------|--|-------------------|---|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| | | | | Masyarakat | | | |
| | Sasaran 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | 85,03 | | | | |
| | | Indikator Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | 85,03 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 7.688.336.000 | 7.463.340.000 | 100 |
| | Sasaran 4 | Meningkatnya kesejahteraan petani | 100,80 | | | | |
| | | Indikator Nilai Tukar Petani | 100,80 | Peningkatan Nilai Tukar Petani | 285.000.000 | 283.341.885 | 100 |
| | Sasaran 5 | Meningkatnya kunjungan wisata | 113,24 | | | | |
| | | Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan | 113,24 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 10.283.591.800 | 8.869.324.087 | 100 |
| | Sasaran 6 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | 140,00 | | | | |
| | | Indikator Jumlah Industri Baru | 140,00 | Optimalisasi Sumberdaya | 26.263.300.000 | 24.292.082.994 | 100 |
| | | | | Administrasi Perkantoran | 46.356.000 | 46.153.500 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| Misi | Sasaran | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi | | |
|------|-----------|--|-------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| | Sasaran 7 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | 126,92 | | | | |
| | Indikator | Jumlah Desa Tematik | 126,92 | Pengembangan Desa Wisata | 233.256.000 | 188.219.000 | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk **Misi : 4 Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani, yang terdiri atas 7 sasaran strategis dan semua sasaran strategis berhasil mencapai target.**

Misi : 5 Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

| Misi | Sasaran indikator kinerja | | Rata-Rata Capaian | Didukung Program | Realisasi | | |
|------|---------------------------|---|-------------------|---|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| 5. | Sasaran | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | 144,44 | | | | |
| | Indikator | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 144,44 | Optimalisasi Sumber Daya | 885.025.000 | 830.067.626 | 100 |
| | | | | Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1.093.950.000 | 1.028.560.200 | 100 |



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk **Misi : 5 Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**, yang terdiri atas 1 sasaran strategis dan berhasil mencapai target.

3.1.9 Permasalahan Umum Yang Dihadapi dan Solusinya

Tabel 3.8. Permasalahan Umum Yang Dihadapi Dan Solusinya

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|--|--|--|-------------|---|---|---|--|---|
| Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah | 100 | 2 (percepatan) | Komitmen kepala daerah dalam pengambilan kebijakan, penganggaran kegiatan dan komunikasi dengan tokoh agama | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang dihadapi adalah : - Banyaknya tokoh dan tempat ibadah yang harus dibina - Terbatasnya kemampuan anggaran daerah | - Pendataan dan pembinaan - Pemberian insentif pada guru ngaji dan imam mesjid serta bantuan sarana prasarana keagamaan secara bertahap sesuai kemampuan daerah | - Melakukan pendataan dan pembinaan - Memberikan insentif pada guru ngaji dan imam mesjid serta bantuan sarana prasarana keagamaan secara bertahap sesuai kemampuan daerah |
| Misi 2 : Meneguhkan Nilai-Nilai | Menurunnya Kesenjangan | Indeks Gini | 101,19 | 0,006 (percepatan) | Pembangunan dari berbagai aspek | Berhasil dan terjadi percepatan, namun | - Pembangunan infrastruktur jalan | - Menyusun perencanaan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|---|--------------------------------|------------------|-------------|---|---|---|--|--|
| Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | antar wilayah dan antar sektor | | | | secara merata ke seluruh pelosok wilayah secara bertahap | secara umum masalah yang masih dihadapi adalah : - Kurangnya konektivitas - Kurangnya atau tidak adanya infrastruktur sarana prasarana wilayah - Pertumbuhan wilayah di Kabupaten Majalengka masih banyak bertumpu di wilayah utara. Khusus untuk sarana distribusi, jumlah pasar masih lebih banyak di wilayah utara dan tengah dibanding di wilayah selatan. | dan jembatan - Pembangunan sarana pra sarana di wilayah tertinggal - Pengembangan dan pembangunan sarana distribusi di wilayah selatan. | pembangunan infrastruktur - Menyediakan lahan untuk pembangunan - Melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah - Pembangunan pasar di Kecamatan Cingambul |
| | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 104,01 | 0,73 (percepatan) | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan | Berhasil dan terjadi percepatan penurunan kemiskinan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah : - Data yang tidak akuntabel dan tidak terupdate - Kegiatan yang | - Pembentukan Puskesmas dan penerapan Pergub tentang pemutakhiran data kemiskinan - Penyusunan indikator kegiatan terkait kemiskinan yang terstruktur | - Membentuk Puskesmas dimana sampai saat ini sudah sampai pada tahap sosialisasi - Menyusun kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|------|--|---|-------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | <p>dilaksanakan tidak terukur dan tidak jelas target capaiannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya fungsi TKPKD - Belum solidnya kolaborasi antara Pemda dengan stakeholder terkait - Belum solidnya sinergi antara Pemda dengan Pemdes dalam penanganan kemiskinan. | <p>dan realistis dan pelaksanaan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan revisi TKPKD disesuaikan dengan SOTK baru dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait - Pengoptimalan forum CSR dan BUMD untuk berkolaborasi dengan Pemda - Pelaksanaan asistensi penyusunan RPJMDes dan RKPDes dan evaluasi APBDes agar lebih pro terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan. | <p>indikator capaiannya jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan revisi TKPKD dimana anggotanya melibatkan seluruh stakeholder terkait kemiskinan. |
| | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 204,1 | 61,02 (percepatan) | Kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait serta meningkatnya kesadaran masyarakat | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan | Peningkatan kesadaran masyarakat | Melakukan sosialisasi dan pembinaan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | perundang-undangan daerah | | |
| Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | 100 | Nilainya Sama B, Tapi Skornya Ada Kenaikan Dari 60,82 di Tahun 2018 Menjadi 67,00 di Tahun 2019 (tetap) | Proses perbaikan secara bertahap pada aspek perencanaan, evaluasi dan pelaporan | Secara skoring sudah ada kenaikan nilai, namun masih pada range predikat B. Secara umum kendala yang masih dihadapi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya informasi tentang pelaksanaan SAKIP yang baik - Pembagian kinerja yang belum begitu terstruktur dengan baik - Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD - Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja belum memadai - Perencanaan kinerja masih harus diperbaiki dari sisi konsistensi - Pengukuran kinerja belum memanfaatkan | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan asistensi dengan Kemenpan-RB - Penyusunan cascading kinerja secara berjenjang - Pelaksanaan <i>Cross-cutting</i> program dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar seluruh OPD dan stakeholder dalam mencapai target kinerja - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala pada capaian kinerja - Pemanfaatan feedback hasil evaluasi - Perbaikan aspek perencanaan kinerja dan review dokumen perencanaan - Perbaikan aspek | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asistensi dengan Kemenpan-RB - Menyusun cascading kinerja - <i>Cross-cutting</i> program dengan kolaborasi seluruh OPD dalam mencapai target kinerja - Monitoring dan evaluasi secara berkala pada capaian kinerja - Memperbaiki aspek perencanaan kinerja dan secara berkala mereview dokumen perencanaan - Memperbaiki aspek pengukuran kinerja - Memperbaiki aspek pelaporan kinerja - Menggunakan aplikasi e-sakip |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|------|---|----------------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | teknologi informasi - Pelaporan kinerja masih kurang dalam hal penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya | pengukuran kinerja - Perbaikan aspek pelaporan kinerja - Pemanfaatan aplikasi e-sakip dalam pengukuran akuntabilitas kinerja | dalam pengukuran akuntabilitas kinerja - Memanfaatkan feedback hasil evaluasi untuk perbaikan |
| | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | 100 | Tetap | Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Penyerahan laporan dan data dari OPD masih belum sesuai waktu yang diminta | Perbaikan secara terus menerus dalam penyusunan laporan keuangan dari sisi waktu dan kualitas oleh seluruh OPD | Memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari sisi waktu dan kualitas oleh seluruh OPD |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100 | Tetap | Peningkatan kualitas layanan oleh seluruh OPD | Nilainya tetap namun secara skoring ada kenaikan. Adapun hal-hal yang masih harus dibenahi adalah konsistensi, motivasi dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan agar lebih baik dari waktu ke waktu | - Pembinaan aparatur - Peningkatan pemahaman kepada penerima layanan | - Melaksanakan pembinaan aparatur - Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada penerima layanan |
| | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | Tidak bisa dinilai keberhasilan atau kegagalannya karena perubahan pada metode perhitungan sehingga tidak bisa dibandingkan | Tidak bisa dinilai karena terjadi perubahan metode perhitungan. Adapun secara umum permasalahan yang dihadapi terkait peningkatan kinerja | - Pelaksanaan pembinaan SDM aparatur - Perubahan target Indeks Profesionalitas ASN dalam berbagai dokumen | - Membina aparatur secara berkesinambungan - Merencanakan perubahan target Indeks Profesionalitas |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|--|------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ASN adalah perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur | dengan model perhitungan baru | ASN dalam berbagai dokumen dengan model perhitungan baru pada momentum perubahan RPJMD |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | 100 | 30 (percepatan) | Komitmen dari kepala daerah | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang dihadapi adalah belum seluruh tunjangan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelas jabatan dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah | Perhitungan kelas jabatan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati dan pemberian tunjangan secara bertahap sesuai kemampuan daerah | Memberikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan nilai 30% dari standar Kemenpan -RB |
| Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 99,17 | 0,57 (percepatan) | Digalakkannya berbagai program pendidikan termasuk pemberian beasiswa atau bantuan peralatan sekolah kepada siswa tidak mampu | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah belum tersedianya data yang memadai serta faktor kemiskinan sangat berpengaruh terhadap Indeks Pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pendataan - Pelaksanaan berbagai program bantuan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan beasiswa berupa (PIP) atau bantuan peralatan sekolah - Mendata anak tidak sekolah (ATS) usia sekolah (7-12), melalui koordinasi dengan Disdukcapil. |
| | Meningkatnya | Indeks Kesehatan | 100,46 | 0,45 (percepatan) | Digalakkannya | Berhasil dan terjadi | - Pengkajian kasus | - Melaksanakan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|---|------------------------------|-----------|-------------|---|--|--|---|--|
| aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan | percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kasus kematian bayi (77) kasus dan kematian ibu (15) kasus kematian ibu - Pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum bidang kesehatan belum tercapai seluruhnya terutama dalam pemenuhan mutu dan kualitas layanan sesuai Permenkes no 4 Tahun 2019 - Sumber daya kesehatan terbatas/belum sesuai standar | internal puskesmas di dampingi tim kabupaten <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi audit maternal prinal (AMP) tingkat kabupaten dengan meningkatkan frekuensi kegiatan - Peningkatan kelas ibu hamil - Peningkatan kualitas pelayanan ANC yang berkualitas - Peningkatan pemahaman pemenuhan SPM bidang kesehatan pada seluruh stakeholder dan masyarakat - Pemenuhan sumberdaya kesehatan secara bertahap melalui proses perencanaan bidang kesehatan yang terintegrasi | pengkajian kasus internal puskesmas di dampingi tim kabupaten <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi audit maternal prinal (AMP) tingkat kabupaten dengan meningkatkan frekuensi kegiatan - Meningkatkan kelas ibu hamil - Meningkatkan kualitas pelayanan ANC yang berkualitas - Meningkatkan pemahaman pemenuhan SPM bidang kesehatan pada seluruh stakeholder dan masyarakat - Menambah sumberdaya kesehatan secara bertahap melalui proses perencanaan bidang kesehatan yang terintegrasi |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|------|---|---|-------------|---|---|---|--|--|
| | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | 85,03 | 3,33 (percepatan) | Komitmen daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan akses sanitasi yang baik bagi masyarakat | Cukup berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang terjadi adalah keterbatasan daerah dalam hal kemampuan anggaran dan perlunya peningkatan koordinasi antara OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran - Pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi untuk kegiatan kedepan - Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia |
| | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | 100,80 | 1,13 (percepatan) | Digalakkannya berbagai program/ kegiatan pertanian berupa fasilitasi alsintan, bimtek, penyediaan irigasi dan pengendalian hama | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang dihadapi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Cuaca - Kepemilikan lahan - Permodalan usaha - Minat konsumsi masyarakat - Kurangnya tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efisiensi budidaya melalui assistensi (pratanam, budidaya, pasca panen) - Pembuatan demplot-demplot - Pemberian bantuan teknis | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan bimtek budidaya dan pasca panen serta demplot - Memberikan bantuan alsintan - Membuat brigade tanaman, pengairan dan pengolahan |
| | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 113,24 | 111492 (percepatan) | Dibangunnya sarana prasarana wisata, daya tarik wisata dan digalakkannya promosi wisata dengan melibatkan | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Lahan parkir yang masih terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Majalengka (RIPARKAB) yang merupakan | <ul style="list-style-type: none"> - Memproses penerbitan Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Majalengka (RIPARKAB) yang |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|------|-------------------|-----------|-------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | seluruh stakeholder terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan fasilitas destinasi yang belum maksimal - Sarana kebersihan dan kesehatan lingkungan destinasi - Tata kelola daerah wisata yang belum optimal - Belum adanya forum-forum atau komunitas pariwisata pada beberapa daerah tujuan wisata - Perlu adanya brading dan citra pariwisata - Belum optimalnya pemasaran yang terintegritas - Jenis produk ekonomi kreatif masih terbatas - Investasi parawisata belum optimal - Kemitraaan antara pengelola wisata belum optimal - Standarisasi dan sertifikasi SDM dan | <ul style="list-style-type: none"> - pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah - Pelaksanaan monitoring pada objek wisata terkait jumlah pengunjung wisatawan - Pembenahan sarana dan prasarana objek wisata - Pelaksanaan sertifikasi terhadap SDM dibidang pariwisata - Pengembangan destinasi wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal | <ul style="list-style-type: none"> - merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah - Melaksanakan monitoring pada objek wisata terkait jumlah pengunjung wisatawan - Melaksanakan pembenahan sarana dan prasarana objek wisata - Melaksanakan sertifikasi terhadap SDM dibidang pariwisata - Melaksanakan pengembangan destinasi wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|---|--|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | usaha pariwisata yang belum optimal | | |
| | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | 140,00 | 11 (percepatan) | Kebijakan untuk mempermudah perijinan dan meningkatnya nilai strategis Majalengka dengan telah dibangunnya berbagai infrastruktur seperti jalan tol dan bandara | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum tantangan yang dihadapi adalah perlunya regulasi yang jelas terkait penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana pendukung | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen RTRW dan RDTR - Perencanaan pembangunan sarana prasarana pendukung | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen RTRW dan RDTR (sedang berproses) - Menyusun perencanaan pembangunan sarana prasarana pendukung |
| | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 126,92 | 30 (percepatan) | Meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan pariwisata | Berhasil dan terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah terbatasnya kemampuan daerah dalam melakukan pembinaan dan memberikan bantuan | <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa wisata - Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Membina desa untuk memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata - Melaksanakan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk pengembangan desa wisata |
| Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 144,44 | 52 (percepatan) | Adanya peningkatan kualitas aparatur desa dan BPD | Terjadi percepatan, namun secara umum masalah yang masih dihadapi adalah : | <ul style="list-style-type: none"> - Akan melakukan Bimtek aparatur pemerintah Desa dan APBD | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian telah dilaksanakan Bimtek aparatur pemerintahan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN (%) | NILAI PERCEPATAN (+) ATAU PERLAMBATAN (-) | PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN | PERMASALAHAN UMUM YG DIHADAPI | ALTERNATIF SOLUSI | SOLUSI YG TELAH DILAKUKAN |
|--|-------------------|-----------|-------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | | | | | | - Masih rendahnya SDM aparatur pemerintahan desa | | Desa dan BPD |



3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan sebesar Rp.3.062.688.867.970,07 dapat direalisasikan Rp.2.964.809.760.813,51 atau 96,80 persen, dengan rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.440.184.573.774,51 atau 91,56 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi penerimaan pajak daerah Rp.123.650.332.813,00 atau 83,15 persen, realisasi penerimaan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

-
- retribusi daerah Rp.18.875.051.518,00 atau 104,09 persen, realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 7.825.254.542,00 atau 100,persen, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 289.883.934.901,51 atau 94,70 persen.
- b. Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp.2.238.268.592.288,00 atau 98,14 persen dari target yang ditetapkan yang terdiri dari Dana Perimbangan direalisasikan sebesar Rp.1.672.148.532.717 atau 97,26 persen dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp.34.860.713.142,00 atau 73,01 persen, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam) sebesar Rp.36.689.381.491,00 atau 93,21 persen Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.167.367.009.900,00 atau sebesar 100,00 persen, dan Dana Alokasi Khusus Rp.433.231.749.184,00 atau 93,20 persen. Sedangkan dana trasfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp.414.881.243.000,00 atau 100,00 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dana bersumber dari dana penyesuaian. Serta Transfer pemerintah provinsi sebesar Rp.151.238.495.571,00 atau 103,19 persen bersumber dari Pendapatan bagi hasil pajak.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan sebesar Rp.286.356.594.751,00 atau 95,08 persen, yang secara keseluruhan bersumber dari Pendapatan Lainnya.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 selengkapnya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan Perubahan | Realisasi | Rp | persen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendapatan | 3.062.688.867.970,07 | 2.964.809.760.813,51 | (97.879.107.156,56) | 96,80 |
| 1,1 | Pendapatan Asli Daerah | 480.737.673.476,07 | 440.184.573.774,51 | (40.553.099.701,56) | 91,56 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 148.715.963.000,00 | 123.650.332.813,00 | (25.065.630.187,00) | 83,15 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 18.133.284.782,80 | 18.875.051.518,00 | 741.766.735,20 | 104,09 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 7.825.254.542,00 | 7.825.254.542,00 | 0,00 | 100 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 306.063.171.151,27 | 289.833.934.901,51 | (16.229.236.249,79) | 94,70 |
| 1,2 | Pendapatan Transfer | 2.280.766.707.194,00 | 2.238.268.592.288,00 | (42.498.114.906,00) | 98,14 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 1.719.316.192.788,00 | 1.672.148.853.717,00 | (47.167.339.071,00) | 97,26 |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 47.750.304.000,00 | 34.860.713.142,00 | (12.889.590.858,00) | 73,01 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam) | 39.363.866.888,00 | 36.689.381.491,00 | (2.674.485.397,00) | 93,21 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.167.367.009.900,00 | 1.167.367.009.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 464.835.012.000,00 | 433.231.749.184,00 | (31.603.262.816,00) | 95,20 |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 414.881.243.000,00 | 414.881.243.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 414.881.243.000,00 | 414.881.243.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 146.569.271.406,00 | 151.238.495.571,00 | 4.669.224.165,00 | 103,19 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 146.569.271.406,00 | 151.238.495.571,00 | 4.669.224.165,00 | 103,19 |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 161.927.887.300,00 | 153.284.600.891,00 | (8.643.286.409,00) | 94,66 |
| 1,3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 301.184.487.300,00 | 286.356.594.751,00 | (14.827.892.549,00) | 95,08 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 139.256.600.000,00 | 133.071.993.860,00 | (6.184.606.140,00) | 95,56 |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 161.927.887.300,00 | 153.284.600.891,00 | (8.643.286.409,00) | 94,66 |
| | Jumlah Pendapatan | 3.062.688.867.970,07 | 2.964.809.760.813,51 | (97.879.107.156,56) | 96,80 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2019



1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019, Belanja Daerah setelah Perubahan Anggaran dianggarkan sebesar Rp.3.212.916.766.996,22 dan dapat direalisasikan Rp.3.013.073.288.336,95 atau 93,78 persen.

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional pada Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp 3.212.916.766.996,22 dapat direalisasikan Rp 3.013.073.288.336,95 atau 93,78 persen. Dimana belanja operasional ini diperuntukan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp 698.282.334.302,89 dan direalisasikan Rp 643.663.697.885,00 atau 92.18 persen. Belanja ini diperuntukan untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2019 di anggarankan sebesar Rp.2.000.000.000,00 tidak dapat di realisasikan.

Rincian selengkapnya, alokasi anggaran dan realisasi Belanja Daerah dapat disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



Tabel 3.10. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp | Persen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Belanja | 3.212.916.766.996,22 | 3.013.073.288.336,95 | (119.843.478.659,27) | 93,78 |
| 2,1 | Belanja Operasi | 2.495.949.507.915,03 | 2.356.038.312.981,95 | (139.911.194.933,08) | 94,39 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.303.825.599.533,99 | 1.254.254.928.058,00 | (49.570.671.475,99) | 96,20 |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 656.201.949.991,44 | 567.152.720.168,95 | (89.049.229.822,49) | 86,43 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 29.288.700.000,00 | 28.854.900.000,00 | (433.800.000,00) | 98,52 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.515.000.000,00 | 3.115.000.000,00 | (400.000.000,00) | 88,62 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 503.118.258.389,60 | 502.660.764.755,00 | (457.493.634,60) | 99,91 |
| | | | | | |
| 2,2 | Belanja Modal | 698.282.334.302,89 | 643.663.697.855,00 | (54.618.636.447,89) | 92,18 |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 40.605.468.403,17 | 13.031.650.596,00 | (27.573.817.807,17) | 32,09 |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan Dan Mesin | 166.477.376.176,38 | 157.538.063.903,00 | (8.939.312.273,38) | 94,63 |
| 2.2.3 | Belanja Gedung Dan Bangunan | 150.806.702.568,00 | 140.011.073.003,00 | (10.795.629.565,00) | 92,84 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan | 283.028.711.424,34 | 279.263.583.063,00 | (3.765.128.361,34) | 98,67 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 57.364.075.731,00 | 53.819.327.290,00 | (3.544.748.441,00) | 93,82 |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2,3 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) | 0,00 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) | 0,00 |
| | Jumlah | 3.196.231.842.217,92 | 2.999.702.010.836,95 | (196.529.831.380,97) | 186,57 |
| | | | | | |
| 2,4 | Transfer | 16.684.924.778,30 | 13.371.277.500,00 | (3.313.647.278,30) | 80,14 |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil Ke Desa | 16.684.924.778,30 | 13.371.277.500,00 | (3.313.647.278,30) | 80,14 |
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 16.684.924.778,30 | 13.371.277.500,00 | (3.313.647.278,30) | 80,14 |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 16.684.924.778,30 | 13.371.277.500,00 | (3.313.647.278,30) | 80,14 |
| | Surplus/(defisit) | (150.227.899.026,15) | (48.263.527.523,44) | 101.964.371.502,71 | |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2019



1.3. Target dan Realisasi Pembiayaan

Adapun untuk pengelolaan pembiayaan daerah dapat kami kemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Penerimaan Piutang daerah kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, jenis penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum



dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- d) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur; tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
- e) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- f) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80persen dan wilayah pedesaan sebanyak 60persen sesuai target *Millenium Development Goal's (MDG's)* tahun 2016 dapat segera tercapai.
- g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Target penerimaan pembiayaan selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 191.612.612.884,44 . Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp 178.355.614.594,15 atau 93,08 persen dengan rincian :

- a) Target SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 159.116.192.126,15 dengan realisasi Rp159.051.151.294,15 atau 99,96 persen.
- b) Target Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00 persen.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

- c) Target Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,00; dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00 persen.
 - d) Target Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebesar Rp 32.227.428.758,29,00; dengan realisasi Rp 19.299.465.800,00 atau 59,89 persen
 - e) Target Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sebesar Rp0,00; dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00persen.
 - f) Target Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp 268.992.00,00 direalisasi Rp 4.997.500,00 atau 1,86 persen.
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Target pengeluaran pembiayaan selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 41.384.713.858,29 dengan Realisasi Rp 28.456.750.900,00 atau 68,76% Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari :

- a) Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 0,00 dengan realisasi Rp 0,00 atau 0,00 persen.
- b) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 9.157.285.100,00 dengan realisasi Rp 9.157.285.100,00 atau 100,00 persen
- c) Pembayaran Pokok Utang Rp 32.227.428.758,29 dengan realisasi Rp 19.299.465.800,00 atau 59,89 persen
- d) Pemberian Pinjaman Daerah Rp 0,00 dengan realisasi Rp 0,00 atau 0,00 persen



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Rekapitulasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp | Persen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Pembiayaan | 150.227.899.026,15 | 149.898.863.694,15 | (329.035.332,00) | 99,78 |
| 3,1 | Penerimaan Daerah | 191.612.612.884,44 | 178.355.614.594,15 | (13.256.998.290,29) | 93,08 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 159.116.192.126,15 | 159.051.151.294,15 | (65.040.832,00) | 99,96 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah | 32.227.428.758,29 | 19.229.465.800,00 | (12.927.962.958,29) | 59,89 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 268.992.000,00 | 4.997.500,00 | (263.994.500,00) | 1,86 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 191.612.612.884,44 | 178.355.614.594,15 | (13.256.998.290,00) | 93,08 |
| | | | | | |
| 3,2 | Pengeluaran Daerah | 41.384.713.858,29 | 28.456.750.900,00 | (12.927.962.958,29) | 68,76 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | 9.157.285.100,00 | 9.157.285.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 32.227.428.758,29 | 19.299.465.800,00 | (12.927.962.958,29) | 59,89 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 41.384.713.858,29 | 28.456.750.900,00 | (12.927.962.958,29) | 68,76 |
| | Pembiayaan Neto | 150.227.899.026,15 | 149.898.863.694,15 | (329.035.332,00) | 99,78 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 86.568.066.010,71 | 86.568.066.010,71 | 100,00 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2019



2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Majalengka.

b. Solusi

Upaya meningkatkan potensi pendapatan daerah yang terbatas dengan cara:

- 1) Penggalan potensi pendapatan daerah yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendapatan daerah;
- 2) Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

3. Realisasi Program untuk Mencapai Target Kinerja Tahun 2019

Untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana diamanatkan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengalokasikan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.1.434.824.111.230,33 dan realisasi keuangan belanja langsung sebesar Rp.1.285.516.868.186,95 atau 89,59 persen, rata-rata realisasi fisik sebesar 97,66 persen. Belanja tersebut untuk mendanai Program Prioritas, Non Prioritas dan dasar.

Program/Kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Program/kegiatan Non Prioritas adalah program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran program prioritas, yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau peningkatan kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program/Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan *output* relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Program/kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Realisasi program-program tersebut di atas diuraikan menurut program, anggaran, jumlah kegiatan, realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Tabel 3.12. Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|-----|---|---------|----------|----------------------|----------------------|-------|-----------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PRIORITAS OPD DAN KECAMATAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DAN URUSAN DASAR | 121 | 2111 | 1.143.501.986.125,17 | 1.003.647.868.557,95 | 87,77 | 98,26 |
| A | PRIORITAS OPD URUSAN WAJIB DAN PILIHAN | 95 | 701 | 933.654.471.391,00 | 853.371.497.451,95 | 91,40 | 99,72 |
| I | BPBD | 1 | 19 | 3.108.133.960,00 | 3.019.299.847,00 | 97,14 | 100,00 |
| 1 | Program Manajemen Kebencanaan | 1 | 19 | 3.108.133.960,00 | 3.019.299.847,00 | 97,14 | 100,00 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|-------------|---|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| II | INSPEKTORAT | 1 | 9 | 1.678.773.450,00 | 1.482.116.030,00 | 88,29 | 100,00 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 9 | 1.678.773.450,00 | 1.482.116.030,00 | 88,29 | 100,00 |
| III | KESBANGPOL | 1 | 4 | 386.150.000,00 | 348.586.600,00 | 90,27 | 100,00 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 4 | 386.150.000,00 | 348.586.600,00 | 90,27 | 100,00 |
| IV | SETWAN | 1 | 2 | 4.462.676.000,00 | 3.136.924.103,00 | 70,29 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 2 | 4.462.676.000,00 | 3.136.924.103,00 | 70,29 | 100,00 |
| V | SETDA | 5 | 51 | 19.214.937.875,00 | 14.774.285.612,00 | 76,89 | 99,59 |
| 1 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 1 | 1 | 254.600.000,00 | 97.492.768,00 | 38,29 | 100,00 |
| 2 | Program Penguatan Adat | 1 | 6 | 3.534.148.500,00 | 3.249.095.420,00 | 91,93 | 100,00 |
| 3 | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan | 1 | 2 | 775.060.000,00 | 465.576.000,00 | 60,07 | 100,00 |
| 4 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 23 | 6.227.632.500,00 | 4.480.230.575,00 | 71,94 | 97,96 |
| 5 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 19 | 8.423.496.875,00 | 6.481.890.849,00 | 76,95 | 100,00 |
| VI | BAPPELITBANGDA | 2 | 13 | 1.997.278.900,00 | 1.511.821.000,00 | 75,69 | 93,75 |
| 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | 1 | 5 | 863.796.000,00 | 721.796.250,00 | 83,56 | 100,00 |
| 2 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 8 | 1.133.482.900,00 | 790.024.750,00 | 69,70 | 87,50 |
| VII | BKPSDM | 2 | 22 | 7.748.944.500,00 | 6.787.297.533,00 | 87,59 | 100,37 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 1 | 5.575.000,00 | 5.523.000,00 | 99,07 | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 18 | 7.243.969.500,00 | 6.330.484.533,00 | 87,39 | 101,44 |
| 3 | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur | 1 | 3 | 499.400.000,00 | 451.290.000,00 | 90,37 | 99,67 |
| VIII | BKAD | 1 | 46 | 8.468.955.498,33 | 6.626.388.435,00 | 78,24 | 100,00 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 46 | 8.468.955.498,33 | 6.626.388.435,00 | 78,24 | 100,00 |
| IX | Dinas Perdagangan | 5 | 21 | 6.768.303.120,00 | 5.740.476.889,00 | 84,81 | 94,72 |
| 1 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 5 | 1.062.444.600,00 | 1.055.506.000,00 | 99,35 | 99,40 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|-------------|---|----------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 2 | Program Pengembangan Sektor Perdagangan | 1 | 1 | 2.846.858.000,00 | 2.810.534.439,00 | 98,72 | 99,00 |
| 3 | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan | 1 | 1 | 90.850.000,00 | 87.076.250,00 | 95,85 | 96,00 |
| 4 | Program Penguatan Distribusi | 1 | 3 | 572.819.000,00 | 571.485.500,00 | 99,77 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 11 | 2.195.331.520,00 | 1.215.874.700,00 | 55,38 | 79,18 |
| X | DISPARBUD | 4 | 33 | 10.984.411.800,00 | 9.360.035.337,00 | 85,21 | 100,00 |
| 1 | Program Penguatan Adat | 1 | 2 | 391.720.000,00 | 225.969.000,00 | 57,69 | 100,00 |
| 2 | Program Pengembangan Pariwisata Daerah | 1 | 28 | 10.283.591.800,00 | 8.869.324.087,00 | 86,25 | 100,00 |
| 3 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 2 | 308.850.000,00 | 264.492.250,00 | 85,64 | 100,00 |
| 4 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| XI | DISTANKAN | 3 | 15 | 4.277.747.117,00 | 4.091.393.960,00 | 95,64 | 96,89 |
| 1 | Program Peningkatan Nilai Tukar Petani | 1 | 2 | 285.000.000,00 | 283.341.885,00 | 99,42 | 99,42 |
| 2 | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan | 1 | 12 | 2.861.198.000,00 | 2.719.397.075,00 | 95,04 | 95,04 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | 1 | 1 | 1.131.549.117,00 | 1.088.655.000,00 | 96,21 | 96,21 |
| XII | KOMINFO | 2 | 9 | 1.589.959.000,00 | 1.196.201.440,00 | 75,23 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 3 | 662.500.000,00 | 304.575.000,00 | 45,97 | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 6 | 927.459.000,00 | 891.626.440,00 | 96,14 | 100,00 |
| XIII | DISKAPUS | 2 | 14 | 389.472.950,00 | 379.111.040,00 | 97,34 | 100,00 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 11 | 338.349.350,00 | 332.063.930,00 | 98,14 | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 3 | 51.123.600,00 | 47.047.110,00 | 92,03 | 100,00 |
| XIV | DPMD | 8 | 24 | 9.260.359.500,00 | 8.932.108.340,00 | 96,46 | 100,00 |
| 1 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 1 | 1 | 137.500.000,00 | 135.052.000,00 | 98,22 | 100,00 |
| 2 | Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) | 1 | 2 | 324.500.000,00 | 318.955.190,00 | 98,29 | 100,00 |
| 3 | Program Penguatan Adat | 1 | 3 | 334.180.000,00 | 331.975.500,00 | 99,34 | 100,00 |
| 4 | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan | 1 | 2 | 1.444.399.500,00 | 1.376.652.650,00 | 95,31 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Nilai Tukar Petani | 1 | 2 | 480.805.000,00 | 354.410.400,00 | 73,71 | 100,00 |
| 6 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 5 | 885.025.000,00 | 830.067.625,00 | 93,79 | 100,00 |
| 7 | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan | 1 | 4 | 4.560.000.000,00 | 4.556.434.775,00 | 99,92 | 100,00 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|--------------|---|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 8 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 5 | 1.093.950.000,00 | 1.028.560.200,00 | 94,02 | 100,00 |
| XV | Dinas Pangan | 6 | 16 | 5.069.606.400,00 | 4.602.574.118,00 | 90,79 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 1 | 1 | 151.824.400,00 | 147.654.100,00 | 97,25 | 100,00 |
| 2 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 3 | 1.100.337.500,00 | 1.047.211.375,00 | 95,17 | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan | 1 | 5 | 581.012.000,00 | 559.368.426,00 | 96,27 | 100,00 |
| 4 | Program Pola Konsumsi | 1 | 2 | 206.640.000,00 | 168.065.400,00 | 81,33 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 4 | 1.615.034.500,00 | 1.278.324.000,00 | 79,15 | 100,00 |
| 6 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 1 | 1.414.758.000,00 | 1.401.950.817,00 | 99,09 | 100,00 |
| XVI | DISPORA | 3 | 26 | 5.602.250.750,00 | 5.529.585.890,00 | 98,70 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat | 1 | 13 | 3.085.250.750,00 | 3.066.442.940,00 | 99,39 | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat | 1 | 12 | 2.387.900.000,00 | 2.334.662.950,00 | 97,77 | 100,00 |
| 3 | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan | 1 | 1 | 129.100.000,00 | 128.480.000,00 | 92,16 | 100,00 |
| XVII | DPMPSTP | 3 | 7 | 502.056.000,00 | 490.613.500,00 | 97,72 | 100,00 |
| 1 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 1 | 98.950.000,00 | 98.145.000,00 | 99,19 | 100,00 |
| 2 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 5 | 298.506.000,00 | 289.891.500,00 | 97,11 | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 1 | 104.600.000,00 | 102.577.000,00 | 98,07 | 100,00 |
| XVIII | KUKM | 3 | 11 | 911.064.000,00 | 785.897.850,00 | 86,26 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 1 | 1 | 69.450.000,00 | 60.052.000,00 | 86,47 | 100,00 |
| 2 | Program Pengembangan Pariwisata Daerah | 1 | 3 | 234.290.000,00 | 227.382.000,00 | 97,05 | 100,00 |
| 3 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 7 | 607.324.000,00 | 498.463.850,00 | 82,08 | 100,00 |
| XIX | NAKERIN | 7 | 14 | 28.980.876.650,94 | 26.687.080.989,00 | 92,09 | 100,00 |
| 1 | Pogram Penguatan Adat | 1 | 1 | 25.150.000,00 | 25.150.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pogram Peningkatan Kompetensi Masyarakat | 1 | 2 | 361.150.000,00 | 359.080.000,00 | 99,43 | 100,00 |
| 3 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 3 | 26.263.300.000,00 | 24.292.082.994,00 | 92,49 | 100,00 |
| 4 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1 | 1 | 258.906.000,00 | 196.081.900,00 | 75,73 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 1 | 68.900.000,00 | 60.000.000,00 | 87,08 | 100,00 |
| 6 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 1 | 1 | 1.540.550.650,94 | 1.335.757.315,00 | 86,71 | 100,00 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|--------------|---|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 7 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 5 | 462.920.000,00 | 418.928.780,00 | 90,50 | 100,00 |
| XX | DP3AKB | 2 | 22 | 15.288.308.000,00 | 15.063.890.138,00 | 98,53 | 100,00 |
| 1 | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 1 | 9 | 771.957.000,00 | 752.230.448,00 | 97,44 | 100,00 |
| 2 | Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) | 1 | 13 | 14.516.351.000,00 | 14.311.659.690,00 | 98,59 | 100,00 |
| XXI | DISDUKCAPIL | 1 | 10 | 4.311.005.000,00 | 4.218.628.032,00 | 97,86 | 106,84 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 10 | 4.311.005.000,00 | 4.218.628.032,00 | 97,86 | 106,84 |
| XXII | DINAS LH | 3 | 11 | 13.873.557.110,00 | 12.838.805.730,00 | 92,54 | 100,00 |
| 1 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 1 | 5 | 6.924.542.200,00 | 6.335.310.704,00 | 91,49 | 100,00 |
| 2 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1 | 4 | 6.330.944.000,00 | 5.956.033.150,00 | 94,08 | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | 2 | 618.070.910,00 | 547.461.876,00 | 88,58 | 100,00 |
| XXIII | DISHUB | 2 | 13 | 8.043.139.360,00 | 7.897.259.201,00 | 98,19 | 100,00 |
| 1 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 5 | 1.309.049.000,00 | 1.292.944.300,00 | 98,77 | 100,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 8 | 6.734.090.360,00 | 6.604.314.901,00 | 98,07 | 100,00 |
| XXIV | SATPOL PP | 6 | 22 | 9.799.005.125,00 | 9.466.030.027,00 | 96,60 | 100,00 |
| 1 | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | 1 | 1 | 36.350.000,00 | 35.568.000,00 | 97,85 | 100,00 |
| 2 | Program Penguatan Adat | 1 | 12 | 6.852.786.500,00 | 6.622.358.500,00 | 96,64 | 100,00 |
| 3 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1 | 1 | 16.946.000,00 | 16.825.000,00 | 99,29 | 100,00 |
| 4 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 5 | 1.679.889.000,00 | 1.618.533.027,00 | 96,35 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 2 | 268.063.000,00 | 232.608.500,00 | 86,77 | 100,00 |
| 6 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 1 | 1 | 944.970.625,00 | 940.137.000,00 | 99,49 | 100,00 |
| XXV | DINSOS | 6 | 19 | 6.189.788.350,00 | 5.995.566.160,00 | 96,86 | 103,53 |
| 1 | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 1 | 6 | 858.691.000,00 | 855.832.050,00 | 99,67 | 100,00 |
| 2 | Program Jaminan Sosial | 1 | 6 | 3.150.495.350,00 | 2.998.938.260,00 | 95,19 | 100,00 |
| 3 | Program Penguatan Adat | 1 | 1 | 40.587.500,00 | 40.587.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | 1 | 14.636.000,00 | 14.636.000,00 | 100,00 | 121,17 |
| 5 | Program Manajemen Kebencanaan | 1 | 3 | 1.125.378.500,00 | 1.107.266.550,00 | 98,39 | 100,00 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---------------|--|----------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 6 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Sosial | 1 | 2 | 1.000.000.000,00 | 978.305.800,00 | 97,83 | 100,00 |
| XXVI | PPSDA | 3 | 31 | 125.209.184.323,68 | 123.050.101.104,00 | 98,28 | 100,00 |
| 1 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 1 | 13 | 15.286.352.826,00 | 14.929.659.000,00 | 97,67 | 100,00 |
| 2 | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan | 1 | 1 | 2.585.894.000,00 | 2.583.834.000,00 | 99,92 | 100,00 |
| 3 | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan | 1 | 17 | 107.336.937.497,68 | 105.536.608.104,00 | 98,32 | 100,00 |
| XXVII | BMCK | 5 | 19 | 213.923.654.100,00 | 203.606.180.628,00 | 95,18 | 100,00 |
| 1 | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan | 1 | 12 | 192.431.666.600,00 | 189.324.866.298,00 | 98,39 | 100,00 |
| 2 | Program Perencanaan Tata Ruang | 1 | 1 | 422.537.500,00 | 422.537.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1 | 1 | 1.500.000.000,00 | 1.446.086.000,00 | 96,41 | 100,00 |
| 4 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 4 | 1.569.450.000,00 | 1.394.006.350,00 | 88,82 | 100,00 |
| 5 | Program Penataan Taman Dalam Kota | 1 | 1 | 18.000.000.000,00 | 11.018.684.480,00 | 61,21 | 100,00 |
| XXVIII | RSUD MAJALENGKA | 2 | 8 | 139.454.089.428,00 | 124.500.919.718,95 | 89,28 | 100,00 |
| 1 | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | 7 | 135.867.851.428,00 | 120.943.696.621,95 | 89,02 | 100,00 |
| 2 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka | 1 | 1 | 3.586.238.000,00 | 3.557.223.097,00 | 99,19 | 100,00 |
| XXIX | RSUD CIDERES | 1 | 6 | 133.455.430.288,87 | 124.763.525.285,00 | 93,49 | 98,04 |
| 1 | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | 6 | 133.455.430.288,87 | 124.763.525.285,00 | 93,49 | 98,04 |
| XXX | DINKES | 4 | 184 | 142.705.352.834,18 | 116.488.792.915,00 | 81,63 | 97,79 |
| 1 | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan | 1 | 13 | 28.053.188.000,00 | 24.445.559.923,00 | 87,14 | 100,00 |
| 2 | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | 155 | 110.172.193.334,18 | 87.951.697.242,00 | 79,83 | 91,18 |
| 3 | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga | 1 | 14 | 4.403.221.500,00 | 4.037.635.750,00 | 91,70 | 100,00 |
| 4 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 2 | 76.750.000,00 | 53.900.000,00 | 70,23 | 100,00 |
| XXXI | DISDIK | 6 | 74 | 291.796.147.250,00 | 282.273.042.552,00 | 96,74 | 97,55 |
| 1 | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | 1 | 2 | 852.810.000,00 | 707.189.260,00 | 82,92 | 95,00 |
| 2 | Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan | 1 | 58 | 145.566.985.000,00 | 143.628.764.720,00 | 82,92 | 96,64 |
| 3 | Program Pendidikan PAUD | 1 | 2 | 2.709.300.000,00 | 2.696.377.085,00 | 99,52 | 100,00 |
| 4 | Program Pendidikan Dasar | 1 | 6 | 141.096.347.250,00 | 133.749.914.187,00 | 94,79 | 93,67 |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2019**

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|----------|---|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 5 | Program Pendidikan Non Formal | 1 | 5 | 1.353.705.000,00 | 1.274.038.300,00 | 94,11 | 100,00 |
| 6 | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat | 1 | 1 | 217.000.000,00 | 216.759.000,00 | 99,89 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| B | PRIORITAS KECAMATAN URUSAN WAJIB dan PILIHAN | 22 | 297 | 16.775.555.500,00 | 16.563.028.292,00 | 98,73 | 97,87 |
| 1 | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | 1 | 15 | 145.025.000,00 | 128.680.010,00 | 88,73 | 93,94 |
| 2 | Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) | 1 | 27 | 334.915.000,00 | 333.139.250,00 | 99,47 | 100,00 |
| 3 | Program Penguatan Adat | 1 | 36 | 448.867.750,00 | 433.412.500,00 | 96,56 | 100,00 |
| 4 | Program Pendidikan PAUD | 1 | 4 | 29.975.000,00 | 29.834.150,00 | 99,53 | 100,00 |
| 5 | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat | 1 | 24 | 326.608.950,00 | 325.658.580,00 | 99,71 | 100,00 |
| 6 | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga | 1 | 20 | 165.702.500,00 | 161.866.800,00 | 97,69 | 100,00 |
| 7 | Program Pengembangan Pariwisata Daerah | 1 | 4 | 33.189.100,00 | 32.976.250,00 | 99,36 | 100,00 |
| 8 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 1 | 62 | 1.437.505.050,00 | 1.379.605.928,00 | 95,97 | 100,00 |
| 9 | Program Jaminan Sosial | 1 | 8 | 103.063.000,00 | 92.121.000,00 | 89,38 | 87,50 |
| 10 | Program Pendidikan Dasar | 1 | 13 | 155.837.500,00 | 155.688.100,00 | 99,90 | 100,00 |
| 11 | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan | 1 | 17 | 187.310.000,00 | 186.237.150,00 | 99,43 | 100,00 |
| 12 | Program Optimalisasi Sumber Daya | 1 | 13 | 151.665.000,00 | 145.849.500,00 | 96,17 | 100,00 |
| 13 | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan | 1 | 5 | 33.565.000,00 | 26.690.000,00 | 79,52 | 80,00 |
| 14 | Program Manajemen Kebencanaan | 1 | 10 | 69.114.500,00 | 68.904.100,00 | 99,70 | 100,00 |
| 15 | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat | 1 | 8 | 142.832.500,00 | 142.682.250,00 | 99,89 | 100,00 |
| 16 | Program Pola Konsumsi | 1 | 2 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | 3 | 30.522.500,00 | 30.512.100,00 | 99,97 | 100,00 |
| 18 | Program Peningkatan Nilai Tukar Petani | 1 | 2 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | 1 | 8 | 118.899.500,00 | 108.268.500,00 | 91,06 | 91,67 |
| 20 | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat | 1 | 14 | 12.808.335.150,00 | 12.728.290.024,00 | 99,38 | 100,00 |
| 21 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1 | 1 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Program Pendidikan Non Formal | 1 | 1 | 7.522.500,00 | 7.512.100,00 | 99,86 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| C | URUSAN DASAR OPD DAN KECAMATAN *) | 4 | 1113 | 193.071.959.234,17 | 133.713.342.814,00 | 69,26 | 97,19 |
| 1 | Program Administrasi Perkantoran | 1 | 869 | 75.858.173.145,00 | 66.720.510.734,00 | 87,95 | 97,74 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik | 1 | 115 | 73.328.419.864,17 | 43.521.106.335,00 | 59,35 | 98,87 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Uraian | Program | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|-----|---|---------|----------|---------------------|-------------------|-------|-----------|
| | | | | | Keuangan (Rp.) | (%) | Fisik (%) |
| 3 | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur | 1 | 8 | 2.557.022.500,00 | 2.307.324.850,00 | 90,23 | 99,63 |
| 4 | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 1 | 121 | 41.328.343.725,00 | 21.164.400.895,00 | 51,21 | 92,54 |



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya setelah akhir tahun anggaran dan merupakan sarana perwujudan dari pertanggungjawaban atas serangkaian perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama satu tahun anggaran, mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, maka disusunlah dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019, program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 dan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, mencakup program-program yang telah diselaraskan dengan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka periode kepemimpinan Dr. H. Karna Sobahi M.M.Pd dan Tarsono D. Mardiana, S.Sos. Adapun kelompok program dan kegiatan tahun 2019 mencakup kelompok program prioritas, non prioritas, dan dasar. Selama tahun 2019, program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan IKU tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan kondisi anggaran atau pembiayaan yang sangat terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 yang terdiri dari 16 sasaran dan 17 indikator sasaran, pengukurannya menunjukkan bahwa **14 indikator (82,35%) mencapai atau melebihi target** karena realisasinya sama dengan atau lebih dari 100 persen. 1 Indikator (Indeks Profesionalitas ASN) tidak bisa dinilai



karena perubahan pada metode perhitungannya dan 2 indikator belum mencapai target karena realisasinya kurang dari 100 persen. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator pada tahun 2019 mencapai 113,71 persen. **Capaian ini jauh lebih baik dari capaian pada tahun sebelumnya** karena pada tahun 2018 dari 21 sasaran dan 35 indikator sasaran yang mencapai target hanya 17 indikator (48,6%) saja.

Realisasi keuangan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pada tahun 2019 sebesar Rp 1.195.833.372.318,00 (realisasi keuangan 88,73 persen, realisasi fisik 100,00 persen) adapun realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp1.240.870.106.885,45 (realisasi keuangan 91,86 persen, realisasi fisik 99,80 persen). **Tahun 2019 capaian efisiensi dari perbandingan realisasi keuangan dan realisasi fisik, yaitu 1,14 persen** lebih tinggi dari tahun 2018 dengan nilai efisiensi 1,09. Adapun **Analisis Efisiensi Sumberdaya dari sisi perbandingan realisasi keuangan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 mencapai 24,86 persen.**

Dalam misi pertama, **sasaran 1 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama**, terdiri atas 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran 100 persen.

Misi Kedua, **sasaran 1 : Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor**, terdiri atas 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target, dengan capaian kinerja sasaran 101,19 persen

Misi kedua, **Sasaran 2 : Pengurangan Tingkat Kemiskinan**, terdiri atas 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja sasaran 104,01 persen.

Misi kedua, **Sasaran 3 : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat**, terdiri dari 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 204,1 persen



Misi ketiga, **Sasaran 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, yang sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 100 persen.

Misi ketiga, **Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas keuangan**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target dengan sasaran capaian kinerja 100 persen.

Misi ketiga, **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, yang sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 100 persen.

Misi ketiga, **Sasaran 4 : Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN** terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, indikator meraih capaian kinerja 100 persen.

Misi keempat, **Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu pendidikan** terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, realisasi target kinerja 99,17 persen.

Misi keempat, **Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, yang sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 100,46 persen.

Misi keempat, **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, realisasi target kinerja 85,03 persen.

Misi keempat, **Sasaran 4 Meningkatnya kesejahteraan petani** terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 100,80 persen.

Misi keempat, **Sasaran 5 Meningkatnya kunjungan wisata** terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 113,24 persen.

Misi keempat, **Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Sektor Industri**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 140,00 persen.



Misi keempat, **Sasaran 7 : Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 126,92 persen.

Misi kelima, **Sasaran 1 : Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa**, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dan sudah mencapai target, dengan sasaran capaian kinerja 144,44 persen.

Secara umum, kendala utama dalam usaha mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa metode perhitungan yang sudah tidak relevan dengan metode perhitungan saat ini sehingga perlu penyesuaian dengan metode baru tersebut.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih ada yang menggunakan indikator kinerja dan target yang belum kuantitatif dan terukur, serta belum mencerminkan kinerja yang akan diukur.
3. Evaluasi capaian kinerja sebagian besar masih pada tataran kegiatan belum sampai pada evaluasi capaian program, seringkali outcome program belum bisa diketahui dalam tahun berkenaan.
4. Masih terjadi inkonsistensi dalam implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Sistem pengumpulan data kinerja dan pengukurannya masih belum optimal pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Sebagian data yang diperlukan cukup sulit diperoleh sehingga perlu koordinasi yang intensif, karena sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami perubahan SOTK pada awal tahun 2020.

Sedangkan untuk perbaikan dimasa mendatang secara umum, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah :

1. Mempertahankan kinerja yang baik, efektif dan efisien;



2. Merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan indikator kinerja dan target yang kuantitatif dan terukur, sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapainya;
3. Konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
4. Mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja dan pengukurannya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga pengukuran kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Majalengka didukung dengan data kinerja yang memadai dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Memperbaiki target sasaran indikator kinerja yang berubah metode perhitungannya;
6. Perbaiki dokumen perencanaan jangka menengah mutlak diperlukan mengingat kondisi saat ini telah terjadi perubahan SOTK di Kabupaten Majalengka.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dari keseluruhan 17 Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 indikator yang tidak bisa dinilai yaitu Indeks Profesionalitas ASN, dan 2 indikator yang capaiannya dibawah 100 persen, yaitu: Indeks Pengetahuan dan Persentase rumah tangga yang bersanitasi baik. Selanjutnya terdapat 2 indikator yang datanya masih berupa angka proyeksi dari Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka dan dinas teknis penanggung jawab kegiatannya, yaitu: Indeks Gini dan Nilai Tukar Petani dikarenakan data tersebut pada tahun 2019 tidak dirilis secara resmi oleh BPS.

Untuk indikator-indikator tersebut rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|----------------------------|---|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Merencanakan perubahan target Indeks Profesionalitas ASN dalam berbagai |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|---|---|
| | | dokumen dengan model perhitungan baru pada momentum perubahan RPJMD. |
| 2. | Indeks Pengetahuan | <p>Tidak tercapai karena diindikasikan masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena kurang mampu atau berbagai alasan lainnya, sehingga tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memberikan bea siswa atau bantuan peralatan sekolah- Mendata Anak Tidak Sekolah (ATS) usia sekolah (7-12), melalui koordinasi dengan Disdukcapil untuk kemudian dicarikan solusi permasalahannya sehingga bisa sekolah. |
| 3. | Persentase rumah tangga yang bersanitasi baik | <p>Tidak tercapainya indikator ini terjadi karena miss komunikasi dimana target pada IKU kabupaten berbeda dengan target IKU di dinas. Target IKU kabupaten lebih besar dari IKU dinas. Sementara dari 2 dinas yang menjadi penanggung jawab indikator ini, hanya 1 dinas saja yang melaksanakan kegiatan terkait. Hal ini menyebabkan target IKU dinas tercapai tapi target IKU kabupaten tidak tercapai. Untuk itu, tindak lanjut yang akan dilaksanakan agar hal ini tidak terulang adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

| No. | Indikator | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|--------------------|--|
| | | sehingga ada keselarasan antara dokumen di tingkat kabupaten dengan dokumen di OPD - Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan kegiatan mendapatkan pendanaan yang memadai agar mencapai target yang telah ditetapkan dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. |
| 4. | Indeks Gini | Melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Gini oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika. |
| 5. | Nilai Tukar Petani | Melaksanakan kegiatan pengukuran Nilai Tukar Petani oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika. |

LAMPIRAN

- 1. DAFTAR PRESTASI**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. PERJANJIAN KINERJA**
- 4. SK TIM LAKIP**
- 5. SOP PENGUMPULAN DATA**
- 6. SK TIM PENGELOLA DATA**
- 7. SURAT PERNYATAAN VALIDASI DATA**

DATA PRESTASI TAHUN 2019

1. Pemerintah Kabupaten Majalengka menerima penghargaan Anugrah PARAHITA EKAPRAYA dari Presiden Indonesia atas Pengarus Utamaan Gender.
2. Pemerintah Kabupaten Majalengka menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan predikat B.
3. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Public
4. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -6 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018
5. Penghargaan kelompok BKR "MEKAR REMAJA" Tingkat Provinsi Jawa Barat
6. Penghargaan kelompok PIK Remaja "GRESS" V tingkat Jawa Barat
7. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Akreditasi B Unit Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
8. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan IRSA (Indonesia Road Safety Award)
9. Penghargaan Awak Kemudi Umum ABDI YASA Teladan Tingkat Jawa Barat Juara 3 pada Lomba Awak Angkutan Teladan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
10. Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Transfortasi Jalan (juara Favorit) Tingkat Jawa Barat pada Seleksi Pelajar pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Barat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
11. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih 4 penghargaan atas pencapaian dalam penghargaan KENREG III AWARD 2019, Kategori Pemberian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Tahun 2019, Kategori Pemanfaatan CAT BKN Tahun 2019, Kategori Pelayanan Status Kepegawaian Tahun 2019 dan Kategori Daerah Yang Merespon terhadap PTDH Tercepat tahun 2019.
12. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan.
13. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Badan Ekonomi Kreatif kategori Pengerak Utama Peningkatan Ekonomi Kabupaten
14. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan pada Kabupaten/Kota Kreatif tahun 2019 "EXOTIC MAJALENGKA SUNDALAND"
15. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama Tahun 2019
16. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan juara terbaik 1 Anugrah Pesona Indonesia tahun 2019 kategori Wisata Air Terpopuler "Cikadongdong River Tubing"

17. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan juara 1 Festival Musik Bamboo untuk Konser Kampong Jatitujuh dari Dinas Pariwisata dan Budaya Bandung Barat.
18. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan juara 1 Festival Musik Kolaborasi Tingkat Jawa Barat untuk Sanggar Panghegar dari Dinas Pariwisata dan Budaya Cirebon.
19. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan juara 2 Pentas Seni Porsenitas untuk Sanggar Sundarancage dari Dinas Pariwisata dan Budaya Brebes.
20. Pemerintah Kabupaten Majalengka menerima penghargaan anugrah ANUBHAWA SASANA DESA atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan desa sadar hukum dari Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia.
21. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan dari MENPAN RB masuk 10 besar (TOP 10) Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan pelayanan sebagai Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolaan pengaduan Terbaik Tahun 2019.
22. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan TOP 30 Instansi Pemerintah Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019.
23. Meraih penghargaan Mediator Hubungan Industrial juara tahun 2019 atas naman Aan Andaya, S.Sos
24. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Milineal/Pemuda Award dari Gubernur Jawa Barat Tahun 2019
25. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Posyandu Awards Tingkat Propinsi Jawa Barat 2019.
26. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Kabupaten Kreatif dari 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Sub Sektor Seni Pertunjukan
27. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) Peringkat 10 Kabupaten/Kota atau 5 tingkat Kabupaten se- Jawa Barat dengan Prestasi Sangat Tinggi
28. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Indeks Kelola Kerja dan Efektifitas Pengelolaan APBD Bidang Pembangunan Ekonomi.
29. Pemerintah Kabupaten majalengka meraih Rekor MURI dan dunia pada olahan kolang kaling dengan jumlah olahan terbanyak 350 varian.
30. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) atas peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan meraih penghargaan Olahan Makanan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dari Provinsi Jawa Barat.

31. DWP Kabupaten Majalengka meraih Fashion Show terfavorit dalam Weekend Marketing BIJB.
32. Prestasi dan Penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Juara I Karate Putri an. Zahfa Aulia (SD Islam Ar-Rahmat)
33. Prestasi dan Penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Juara II Karate Putra an. Pandu Bratamanggala (SDN Leuwimunding I)
34. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Juara III Altetik Putra O2SN Tk. Propinsi an. Ihsan Muhamad Filanthrop (SMPN 2 Majalengka)
35. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Juara III Karate Putri Putra O2SN Tk. Propinsi an. Ajriya Najwah Nurul Aini (SMPN 1 Jatiwangi)
36. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Juara Harapan I Tutor Pendidikan Kesetaraan an. Egi Trialogi, SPd (PKBM Miftahul Huda)
37. Prestasi dan Penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Nomine Een Sukaesih Award Katagori PNFI Tahun 2019 a.n Guru Inspitarif dan Prestasi PKBM Miftahul Huda.
38. Prestasi dan Penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Juara II Unjuk Kabisa Warga Belajar pada Hari Aksara Internasional di Kab. Garut.
39. Prestasi dan Penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Juara III Stand Pameran HAI 2019 pada Hari Aksara Internasional di Kab. Garut.
40. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih Juara 1 Komoditas Sapi Potong Kriteria Jantan PO Umur 24-36 Bulan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat pada Kegiatan Expo Peternakan dan Kontes Ternak Jabar 2019.
41. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih Juara 1 Exebisi Komoditas Domba Priangan Kriteria Jantan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat pada Kegiatan Expo Peternakan dan Kontes Ternak Jabar 2019.
42. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Rumah Sakit Umum Daerah Cideres meraih prestasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 Lulus Akreditasi Paripurna (Bintang 5) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit
43. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Rumah Sakit Umum Daerah Cideres meraih prestasi Penyerah Piutang Paling Optimal Dalam Kerjasama Pengurusan Piutang Daerah dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon.
44. Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapat Piagam Penghargaan Tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan Terpadu Penggunaan UTP Tahun 2019 di Pasar rakyat, ditetapkan sebagai pasar Tertib Ukur di Pasar Desa Ciborelang Jatiwangi, Pasar Desa Rajagaluh, Pasar Desa Cikijing, Pasar

Desa Maja dan pasar Desa Jatitujuh dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sesuai SK Dirjen PKTN No. 234 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019.

45. Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih Juara Produk Favorit II Penghargaan Teknologi Tepat Guna Inovasi pada Gelar Teknologi Tepat Guna ke –IX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
46. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat sebagai Peringkat 5 dari 7 kabupaten pada POPWILDA (Medali emas 3, Perak 4, Perunggu 13)
47. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat sebagai Peringkat 6 dari 9 kabupaten pada PORSENITAS (Medali emas 1, Perak 5, Perunggu 14)
48. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat sebagai Juara 3 ganda Putra pada Festival Pencak Silat Tk. Jawa Barat.
49. Prestasi dan Penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat sebagai Juara 3 Egrang pada Invitasi Olahraga Tradisional Tk. Jawa Barat.
50. Prestasi dan Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Juara 1 Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata pada Seleksi Pemuda Pelopor.
51. Prestasi dan Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Juara 1 Bidang Pangan pada Seleksi Pemuda Pelopor.
52. Prestasi dan Penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Nominasi Pemuda Pelopor Tk. Nasional pada Seleksi Pemuda Pelopor.
53. Prestasi dan Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Juara 2 Wirausaha Pemuda pada Pemilihan Wirausaha Muda Unggulan.
54. Diraihnya nilai B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 29

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terukur, maka perlu adanya indikator kinerja pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang3

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);

18. Peraturan4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka dan sasaran strategis organisasi.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN IKU

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

IKU KABUPATEN MAJALENGKA

Pasal 3

- (1) IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

(2) IKU6

- (2) IKU Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan IKU untuk :

- a. Menetapkan IKU;
- b. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan :

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator utama; dan
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014–2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019
BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 29 Tahun 2019

Tanggal : 18 Juli 2019

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAJALENGKA 2018-2023

| | MISI | TUJUAN | | SASARAN | | | PENJELASAN | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | KONDISI AKHIR | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--------|--|------------|---|-------|-------|-------|-------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------|---|---|---|--|
| | | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | | |
| 1 | Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama | 1 | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | 1 | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | $\frac{(d_2 - d_1)}{d_1} \times 100\%$ <p>d1 : rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n-1 d2 : rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n</p> | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Setda | 1 | Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama | 1 | Program Peningkatan Nilai-nilai keagamaan |
| 2 | Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 1 | Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | 1 | Indeks Gini | Poin | $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> | 0,337 | 0,335 | 0,333 | 0,330 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | Dinas BMCK | 1 | Mengurangi disparitas/kesenjangan antar Wilayah dan antar sektor | 1 | Program Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | 2 | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan | | | 3 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan | | | 4 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | 5 | Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 6 | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas PPSDA | | | 7 | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Bersih | | |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | | | PENJELASAN | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | | | | | |
|------|--------|---|--|------------------|---|---|---|-------|-------|------|------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|--|
| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | | KONDISI AWAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | KONDISI AKHIR | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | |
| | | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | 2 | Angka Kemiskinan | Persen | $Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y _i = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk | 10,79 | 10,48 | 10,08 | 9,68 | 9,09 | 8,48 | 8,48 | Dinsos | 2 | Mengurangi Kesenjangan Antar Sektor | 1 Program monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 2 Program Jaminan Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin 4 Program peningkatan produktivitas masyarakat miskin 5 Program Peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin 6 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin 7 Program Pemberdayaan Petani Miskin 8 Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin 9 Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 10 Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Keluarga Miskin 11 Program Penanggulangan Kemiskinan | |
| | 2 | Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 3 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | $\frac{(d_2 - d_1)}{d_1} \times 100\%$ d1 : Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n-1 d2 : Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Satpol PP | 1 | Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 1 Program Pembinaan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2 Program Pencegahan Potensi Gangguan Kamtibmas |
| | | | | | | | | | | | | | | Kecamatan | | | 3 | Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | | | | PENJELASAN | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------|---|------|---|-------------|----------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | KONDISI AKHIR | | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | 1 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | | Nilai | Hasil nilai SAKIP Kabupaten Majalengka yang dikeluarkan oleh KemenPANRB | B | B | BB | A | A | A | A | Inspektorat Bappelitbangda Diskominfo | 1 | | 1 Program Pembinaan dan Pengawasan 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | 2 | Opini BPK RI | Opini | Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD BKAD Inspektorat | 2 | Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 1 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Program Pembinaan dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table> | NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | 1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak baik | 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang baik | 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik | 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat baik | B | B | B | B | B | B | B | Diskominfo Disdukcapil Dinas PMPTSP RSUD Majalengka | 3 | Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik |
| | NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | 4 | Indeks Profesionalitas ASN | poin | $IdxPro = \text{coef}(1 - \text{gaps}) + \text{Koeff}(Kj) + \text{Koeff}(1 - \frac{1}{2} S(\text{inex})) - \text{Koeff}(1 - \text{inDiscpl})$ <p>Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SAKP S1 : Sdsh rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin</p> | 88,25 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | 90,80 | 90,00 | 90,00 | BKPSDM RSUD Cideres | 4 | Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN | 2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Cideres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BKPSDM | 5 | Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah | 2 Program peningkatan kompetensi Manajerial ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | | | | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | | | | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | | | | |
|------|---|--|---|--------|--|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|
| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PENJELASAN | KONDISI AWAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | KONDISI AKHIR | KEBIJAKAN | | PROGRAM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BKPSDM | | 3 | Program pengembangan karier ASN | | | |
| | | | | 5 | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempanan RB | persen | Besaran Tunjangan Kinerja ASN di Kabupaten Majalengka Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempanan RB x100% | | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | BKPSDM | 6 | Meningkatkan kesejahteraan aparatur | 1 | Program Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Aparatur |
| 4 | Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing | Meningkatnya Mutu pendidikan | 1 | Indeks Pengetahuan | Poin | $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \times 100$ <p>dimana:</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \times 100$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \times 100$ <p>Keterangan: HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata Lama Sekolah</p> | 56,89 | 58,03 | 58,84 | 59,55 | 60,23 | 61,19 | 61,19 | Disdik | 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar | 1 | Program Pendidikan Sekolah Dasar |
| | | | | | | | | | | | | | Disdik | 2 | Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama | 2 | Program Pendidikan SMP | | |
| | | | | | | | | | | | | | Disdik | 3 | Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal | 3 | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal | | |
| | | | | | | | | | | | | | Disdik | 4 | Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan | 4 | Penguatan Tata Kelola Pendidikan | | |
| | | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 2 | Indeks Kesehatan | Poin | $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \times 100$ <p>Keterangan: AHH : Angka Harapan Hidup</p> | 76,43 | 76,53 | 76,75 | 77,04 | 77,26 | 77,54 | 77,54 | Dinkes | 5 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) | 1 | Program Pelayanan Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | 3 | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | Persen | $\frac{\text{jumlah Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik}}{\text{jumlah seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$ | 65,14 | 80,52 | 80,67 | 80,98 | 81,31 | 81,65 | 81,65 | Dinas PPSDA | 6 | Pemenuhan SPM bidang kesehatan | 2 | Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh | 1 | Program Pemenuhan utilitas sanitasi | | |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | | | PENJELASAN | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | | | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | | |
|------|---|---|--|---|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|--|--|--|
| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | | KONDISI AWAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | KONDISI AKHIR | | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas LH | 8 Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh | 2 Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh |
| | | | Meningkatnya kesejahteraan petani | 4 Nilai Tukar Petani | Poin | $\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$ | 99,67 | 100,00 | 101,31 | 102,12 | 102,94 | 103,76 | 103,76 | Distankan | 9 Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian | 1 Program Peningkatan Produksi Hortikultura 2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan |
| | | | Meningkatnya kunjungan wisata | 5 Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | banyaknya Kunjungan Wisatawan dalam waktu satu tahun berjalan | 589.843 | 619.335 | 681.269 | 749.396 | 824.335 | 906.769 | 906.769 | Disparbud | 10 Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata | 1 Program pembangunan dan Pengembangan destinasi wisata layak kunjung 2 Program Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif |
| | | | Meningkatnya Investasi sektor Industri | 6 Jumlah industri baru | unit | banyaknya Industri baru yang dibangun pada tahun-n | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Dinas PMPTSP Disnakerin | 11 Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi 12 Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan | 1 Program Percepatan Investasi Daerah 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | 7 Jumlah desa tematik | Desa | banyaknya desa tematik pada tahun-n | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Dinas Pangan | 13 Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi | 1 Program Pengembangan Desa Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | Disparbud | 14 Mewujudkan Desa Wisata | 2 Program Pengembangan Desa Wisata |
| | | | | | | | | | | | | | | Kecamatan | 15 Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan | 3 Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan |
| 5 | Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | 1 Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dalam waktu satu tahun berjalan | n/a | 36 | 51 | 52 | 41 | 41 | 221 | Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Kecamatan | 1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa 3 Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa | 1 Program pembinaan pemberdayaan masyarakat desa 2 Program pembinaan pengelolaan keuangan desa 3 Program pembinaan peningkatan kompetensi lembaga dan aparatur desa 4 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | | | PENJELASAN | TARGET YANG AKAN DI CAPAI | | | | | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | |
|------|--------|---------|-----------|--------|------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | | KONDISI AWAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | KONDISI AKHIR |

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI.,M.MPd**

Jabatan : **Bupati Majalengka**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.



Majalengka, November 2019
Bupati Majalengka

[Handwritten Signature]
Dr. H. KARNA SOBAHI.,M.MPd

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**KABUPATEN
ANGGARAN**

**: MAJALENGKA
: 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|-----|--|---|---------|-----------|
| | | | | |
| 1. | Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama. | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di rumah ibadah | 5 | persen |
| 2. | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. | Indeks Gini | 0,335 | poin |
| 3. | Pengurangan tingkat kemiskinan. | Angka kemiskinan | 10,48 | persen |
| 4. | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat | 10 | persen |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja. | Nilai SAKIP | B | nilai |
| 6. | Terwujudnya akuntabilitas keuangan. | Opini BPK-RI | WTP | opini |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | poin |
| 8. | Meningkatnya profesionalisme kinerja dan kesejahteraan ASN. | 1. Indeks profesionalitas ASN | 89 | poin |
| | | 2. Persentase besaran tunjangan kinerja berdasarkan standar kemenpan RB | 30 | persen |
| 9. | Meningkatnya mutu pendidikan. | Indeks pengetahuan | 58,03 | poin |
| 10. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | Indeks kesehatan | 76,53 | poin |
| 11. | Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman. | Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | 80,52 | persen |
| 12. | Meningkatnya kesejahteraan petani. | Nilai tukar tani | 100,00 | Poin |
| 13. | Meningkatnya kunjungan wisata. | Jumlah kunjungan wisatawan | 619.335 | kunjungan |
| 14. | Meningkatnya investasi sektor industri. | Jumlah industri baru | 40,00 | unit |
| 15. | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa. | Jumlah desa tematik | 26,00 | desa |
| 16. | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 36 | desa |

**JUMLAH PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN**

**: 32 Program
: Rp1.389.227.566.930,33**

(Satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga tiga rupiah)





BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/KEP. 171 -Bappedalitbang/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menyusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dari seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
 - c. Menyusun materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
 - e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA,

Karna Soehadi
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 050/KEP. 171 -Bappedalitbang/2020
 TANGGAL : 20 Februari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2019

- a. Pembina : Bupati Majalengka;
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka;
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
- d. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- e. Wakil Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Majalengka;
- f. Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- g. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota
 - 1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a) Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 - 5) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

- 6) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
- 7) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- 8) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
- 9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- 10) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- 11) Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a) Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 - 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - 5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 - 6) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 - 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 - 9) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

3. Bidang Keuangan Daerah

- a) Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
4) Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Bidang Penyusunan, Editing dan Penyelarasan Laporan

- a) Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
5) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
6) Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan pada Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
7) Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Bidang Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 050/KEP. 171 -Bappedalitbang/2020
TANGGAL : 20 Februari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019

a. PEMBINA :

1. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Menandatangani Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

b. WAKIL PEMBINA :

1. Membantu Pembina (Bupati Majalengka) dalam memberikan arahan kepada Tim dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

c. PENGARAH :

1. Memberikan pengarahan dan penjelasan teknis dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

d. PENANGGUNGJAWAB :

1. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

e. WAKIL PENANGGUNGJAWAB :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

f. KETUA PELAKSANA :

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun materi.
3. Memfasilitasi pelayanan dalam mendukung pekerjaan bagi seluruh bidang penyusun materi.
4. Menyusun Jadwal Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
5. Menyusun rencana kebutuhan biaya kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
6. Menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

g. SEKRETARIS :

1. Membantu ketua pelaksana dalam pengumpulan bahan dan data dari perangkat daerah/kecamatan/instansi terkait untuk bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
3. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

h. ANGGOTA :

1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a) Koordinator :

- 1) Membantu ketua pelaksana dan sekretaris dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 terkait materi laporan pembangunan ekonomi dan pembangunan.
- 2) Memonitor kinerja anggota tim bidang ekonomi dan pembangunan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi laporan bidang ekonomi dan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

b) Anggota :

- 1) Membantu koordinator bidang ekonomi dan pembangunan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 2) Membantu menyiapkan materi laporan bidang ekonomi dan pembangunan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

- 3) Membantu menyusun laporan bidang ekonomi dan pembangunan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a) Koordinator :

- 1) Membantu ketua pelaksana dan sekretaris dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 terkait materi laporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Memonitor kinerja anggota tim bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

b) Anggota :

- 1) Membantu koordinator bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 2) Membantu menyiapkan materi laporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Membantu menyusun laporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

3. Bidang Keuangan Daerah

a) Koordinator :

- 1) Membantu ketua pelaksana dan sekretaris dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019 terkait materi laporan bidang keuangan daerah.
- 2) Memonitor kinerja anggota tim bidang keuangan daerah selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi bidang keuangan daerah yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

b) Anggota :

- 1) Membantu koordinator bidang keuangan daerah selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 2) Membantu menyiapkan materi laporan bidang keuangan daerah selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Membantu menyusun laporan bidang keuangan daerah selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

4. Bidang Penyusunan, Editing dan Penyelaras Laporan

a) Koordinator :

- 1) Membantu ketua pelaksana dan sekretaris dalam penyusunan, editing dan penyelaras Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 2) Memonitor kinerja anggota tim bidang penyusunan, editing dan penyelaras laporan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Berkoordinasi dengan bidang penyusun materi terkait isi materi dan data yang akan disusun dan dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 4) Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi laporan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.

b) Anggota :

- 1) Membantu koordinator bidang penyusunan, editing dan penyelaras laporan selama melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 2) Membantu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 3) Membantu mengedit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 4) Membantu menyelaras Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 5) Berkoordinasi dengan anggota bidang penyusun materi terkait kebenaran isi materi yang akan disusun dan dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019.





**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 050/94-Litbang/Bappedalitbang

TENTANG

**Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedures)
Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures) Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka tentang Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures) Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1)
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29)

- Memperhatikan :
1. Hasil kajian terhadap proses operasional di Tim penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka);
 2. Saran dan pertimbangan Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tentang Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures) Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka.

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures) Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut SOP Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : SOP Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka, mengatur Kesekretariatan, TIM Penyusun Lakip kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : SOP Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai di lingkungan Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing
- KEEMPAT** : SOP Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA bersifat dinamis, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, serta dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika/perubahan kebijakan pimpinan dan organisasi TIM Penyusun Lakip kabupaten Majalengka
- KELIMA** : Agar dalam penerapan SOP Pengumpulan Data LAKIP Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu dilakukan sosialisasi pengintegritasan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh setiap pimpinan unit organisasi.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka



YAYAN SUMANTRI

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



| | |
|--|--|
| Nomor SOP | 050/94-Litbang/Bappedalitbang |
| Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020 |
| Tanggal Efektif | 2 Januari 2020 |
| Ditetapkan Oleh | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan |
| Nama SOP : SOP Pengumpulan Data Kinerja | |

| | |
|--|--|
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1); | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam pengumpulan data Kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pengumpulan data kinerja 3. Memahami prosedur Pengumpulan Data Kinerja 4. Memahami tentang penyusunan laporan kinerja dan pengukuran kinerja |
| Keterkaitan: | Peralatan/Perlengkapan: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Format Pengumpulan data kinerja |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: |
| Apabila di masa yang akan datang SOP ini sudah sesuai dengan prosedur, maka SOP ini akan di revisi ulang | |

| NO | URAIAN PROSEDUR | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | |
|----|--|------------|-------|--------------------|---------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|-----|
| | | Sekretaris | Kabid | Tim Penyusun Lakip | Kasubid | Persyaratan | Waktu | Output | Ket |
| 1. | Memerintahkan pengumpulan data kinerja | | | | | Struktur organisasi | 15 menit | Draf Tim | |
| 2. | Membuat tim | | | | | Draf Tim | 30 menit | Tim | |
| 3. | Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data | | | | | Tim | 2 hari | Rencana kegiatan pengumpulan data | |
| 4. | Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan | | | | | Data Kinerja | 1 hari | Konsep Laporan Hasil Pengumpulan Data | |
| 5. | Laporan Kabid kepada sekretaris terkait pengumpulan data kinerja | | | | | Konsep Laporan Data Kinerja | 1 hari | Konsep Laporan Hasil Pengumpulan Data | |
| 6. | Melakukan rapat intern dengan tim Lakip | | | | | Data Kinerja | 30 menit | Laporan Final | |
| 7. | Hasil Pengumpulan Data kinerja | | | | | | 1 hari | Laporan yang telah di tanda tangan | |



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

NOMOR : 050/98-Litbang/Bappedalitbang

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan data kinerja yang valid dan akuntabel untuk penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka perlu disusun Tim Pengelola Data LAKIP Kabupaten Majalengka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pengelola Data LAKIP Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Data untuk Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan data dari setiap Misi yang mendukung Indikator Kinerja Utama;
 - b. Menyimpan dan menyediakan data yang mendukung Indikator Kinerja Utama
 - c. Menyediakan Informasi terkait data dari setiap misi yang ada di indikator Kinerja Utama
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA



YAYAN SUMANTRI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 050/98-Litbang/Bappeda

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENGELOLA DATA LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA**

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PENGELOLA DATA LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA

Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama

- 1) Indikator Kinerja Sasaran : Presentase Peningkatan Rata-rata Jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
- a) Penanggungjawab Data : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat

- 1) Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Gini
- a) Penanggungjawab Data : Bappedalitbang
- 2) Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kemiskinan
- a) Penanggungjawab Data : Bappedalitbang
- 3) Indikator Kinerja Sasaran : Presentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat
- a) Penanggungjawab Data : Kepala Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya

- 1) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Sakip
- a) Penanggungjawab Data : Bappedalitbang
- 2) Indikator Kinerja Sasaran : Opini BPK RI
- a) Penanggungjawab Data : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
- 3) Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat
- a) Penanggungjawab Data : Bagian Organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- 4) Indikator Kinerja Sasaran : 1) Indeks Profesionalitas ASN
2) Presentase Besaran Tunjangan Kinerja Berdasarkan Standar Kemenpan RB
- a) Penanggungjawab Data : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1) Indakor Kinerja Sasaran | : | Indeks Pendidikan |
| a) Penanggungjawab Data | : | Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka |
| 2) Indikator Kinerja Sasaran | : | Indeks Kesehatan |
| a) Penanggungjawab Data | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka |
| 3) Indikator Kinerja Sasaran | : | Presentase Rumah Tangga yang mengakses Sanitasi baik |
| a) Penanggungjawab Data | : | Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka |
| 4) Indikator Kinerja Sasaran | : | Nilai Tukar Petani |
| a) Penanggungjawab Data | : | Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka |
| 5) Indikator Kinerja Sasaran | : | 1) Jumlah Kunjungan Wisatawan 2) Jumlah Desa Tematik |
| a) Penanggungjawab Data | : | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka |
| 6) Indikator Kinerja Sasaran | : | Jumlah Industri Baru |
| a) Penanggungjawab Data | : | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka |

Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1) Indikator Kinerja Sasaran | : | Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya |
| a) Penanggungjawab Data | : | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka |

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA



YAYAN SUMANTRI

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SAS/RAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DIINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SABARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Instansi | : SATUAN POLSI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
| Nama Penanda Tangan | : AGUS SURATMAN, S.K.M., M.Si | |
| Jabatan | : SEKRETARIS SATPOL PP DAN DAMKAR | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|---|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktfitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Instansi | : <i>Bappedalitgong</i> |  |
| Nama Penanda Tangan | : <i>Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd. M.Pd</i> | |
| Jabatan | : <i>Sekretaris</i> | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SEIDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Stendar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,83 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Instansi | : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
| Nama Penanda Tangan | : HJ. SITI MAWE, S.H., M.Si. | |
| Jabatan | : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 3 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Instansi | : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |
| Nama Penanda Tangan | : Drs. Mahmud, M.P | |
| Jabatan | : Sekretaris Dinas | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besarai Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|--|
| Nama Instansi | : | Dinas Kesehatan |  |
| Nama Penanda Tangan | : | dr. H. Jasing Setiawan, M.K.M. | |
| Jabatan | : | Sebertaris Dinas | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGI/N KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PÉRDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|--|--|
| Nama Instansi | : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan |  |
| Nama Penanda Tangan | : Aking Dadang Herawan, S.Sos | |
| Jabatan | : Sekretaris Dinas | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|--|--|
| Nama Instansi | : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. MAJALENGKA |  |
| Nama Penanda Tangan | : HJ. ROPPEDAH, S.Pd., M.M NIP. 196406051984102009 PEMBINA TKI, III/d. | |
| Jabatan | : SEKRETARIS DINAS | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | P.I DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertio di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,38 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKE3 |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|--|--|
| Nama Instansi | : - Sekretariat Daerah - Bagian Kesra |  |
| Nama Penanda Tangan | : Rachmat Kartono.S.STP.M.Si | |
| Jabatan | : Kepala Bagian Kesra | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dari tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 73 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemernpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah Industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| Nama Instansi | : SEKRETARIAT DAERAH |  |
| Nama Penanda Tangan | : H. DEDE SUPENA NURBAHAR, SH, M | |
| Jabatan | : KABAG ORGANISASI | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BACIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemapan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--|
| Nama Instansi | : | BKPSDM Kab. Majalengka |  |
| Nama Penanda Tangan | : | Aja Suteja Sulaksana, S.Sos | |
| Jabatan | : | Sekretaris | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | P.I DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemempn RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Instansi | : DINAS PENDIDIKAN KAB. MAJALENGKA |  |
| Nama Penanda Tangan | : Dr. H. HERI RAHTUBI, S.Pd., M.Pd. | |
| Jabatan | : SEKERTARIS DINAS PENDIDIKAN KAB. MAJALENGKA | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Karni yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Stender Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| Nama Instansi | : BKAD KAB. MAJALENGA |  |
| Nama Penanda Tangan | : DRS. IWAN T, M. Si | |
| Jabatan | : SEKRETARIS | |

PERNYATAAN VALIDITAS DATA

LAKIP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang instansi kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagaimana yang kami tandai adalah valid sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan memiliki data pendukung.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SAS/RAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN KESRA SETDA |
| 2 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | Poin | 0,335 | 0,331 | 101,19 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,06 | 104,01 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 4 | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 20,41 | 204,1 | Sangat Memuaskan | SATPOL PP |
| 5 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAPELITBANGDA |
| 6 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | 100 | Sangat Memuaskan | BKAD |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | B | B | 100 | Sangat Memuaskan | BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,50 | 78 | Tidak Bisa Dinilai | Tidak Bisa Dinilai Karena Metode Perhitungan Berubah | BKPSDM |
| | | Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | Persen | 30 | 30 | 100 | Sangat Memuaskan | BKPSDM |
| 9 | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 57,55 | 99,17 | Sangat Memuaskan | DISDIK |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,88 | 100,46 | Sangat Memuaskan | DIINKES |
| 11 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang megakses sanitasi baik | Persen | 80,52 | 68,47 | 85,03 | Memuaskan | PSDA |
| 12 | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | Poin | 100 | 100,8 | 100,80 | Sangat Memuaskan | DISTANKAN |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Kunjungan | 619335 | 701335 | 113,24 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah industri baru | Unit | 40 | 56 | 140,00 | Sangat Memuaskan | PERDAGIN |
| 15 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | Desa | 26 | 33 | 126,92 | Sangat Memuaskan | DISPARBUD |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | CAPAIAN KINERJA (%) | KET. | PJ DATA |
|----|---|---|--------|------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | | | |
| 16 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | Desa | 36 | 52 | 144,44 | Sangat Memuaskan | DPMD |
| | RATA-RATA | | | | | 115,53 | Sangat Memuaskan | |

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Instansi | : <i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</i> |  |
| Nama Penanda Tangan | : <i>Drs. Piping Ma'amif</i> | |
| Jabatan | : <i>Sekretaris</i> | |